

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA  
BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA  
KABUPATEN GOWA**

***IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE IN  
THE SOCIAL ASSISTANCE OF THE FAMILY HOPE PROGRAM  
FOR THE COMMUNITY IN TODDOTOA VILLAGE  
GOWA REGENCY***



**TESIS**

**Oleh**

**Nur Annisa K**

**NIM. 105091101321**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PRODI MAGISTER PENDIDIKAN SOSIOLOGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN TESIS**

**IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN  
SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP  
MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA**

Oleh

NUR ANNISA K  
105091101321

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Fatimah Azis, M.Pd

Dr. Yumriani, M.Pd

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd  
NBM. 613949

Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D  
NBM. 988462

## HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul : Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa  
Nama : Nur Annisa K  
NIM : 105091101321  
Program Studi : Magister Pendidikan Sosiologi

Telah diuji dan dipertahankan di depan penguji Tesis pada tanggal 29 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Sosiologi pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Juli 2023

### Tim Penguji

Dr. Hafidzh Elfiansyah Parawu, M.Si  
(Pimpinan/penguji)

Dr. Fatimah Azis, M.Pd  
(Pembimbing 1/penguji)

Dr. Yumriani, M.Pd  
(Pembimbing II/penguji)

Dr. Lukman Ismail, M.Pd  
(Penguji)

Kaharuddin, S.Pd.,M.Pd.,Ph,D  
(Penguji)

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Annisa K

Nim : 105091100221

Program Studi: Magister Pendidikan Sosiologi

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa” merupakan hasil karya asli. Seluruh ide yang ada dalam tesis ini, kecuali yang saya nyatakan sebagai kutipan, merupakan ide yang saya susun sendiri, selain itu tidak ada bagian dalam tesis ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Jika pernyataan atas terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh PPs Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Mei 2023

Nur Annisa K

## MOTTO DAN PERUNTUKKAN

**“Belajarliah untuk menerima dan ikhlas akan segala ketetapanNya, maka kamu tidak akan merasa kekurangan”.**



Dengan segala kerendahan hati  
Keperuntukan karya ini  
Kepada Ayah dan Ibu atas segala cinta, kasih, doa dan dukungan  
Yang sungguh luar biasa.

Kedua saudara ku Serta sahabat yang selalu  
Memberikan dukungan dengan tulus dan ikhlas.

Terima kasih tak terhingga penulis ucapkan.  
Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya  
Kepada kita semua.

## ABSTRAK

**Nur Annisa K, 2023.** Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa. Dibimbing oleh Fatimah Azis dan Yumriani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa, untuk mengetahui mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa, dan untuk mengetahui respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik penelitian yang digunakan yaitu, observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) memiliki mekanisme yaitu dimulai dari pendataan, sosialisasi sampai penyaluran bantuan, serta penarikan bantuan bisa dilakukan di POS dan Bank BNI, namun dalam penyaluran bantuan terdapat kendala yaitu terkendala jarak karena tidak adanya ATM BNI di Desa Toddotoa. Dan pendistribusian bantuan sosial di Desa Toddotoa sudah memenuhi prinsip keadilan sosial, dan program keluarga harapan ini memberikan dampak yang baik karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat namun disamping itu juga memiliki dampak negatif karena membuat masyarakat ketergantungan dengan bantuan yang diberikan sehingga masyarakat belum bisa mandiri sepenuhnya. Dan jumlah bantuan yang diterima berbeda-beda atau sesuai dengan kategori penerima, serta penyaluran bantuan di Desa Toddotoa sudah tepat waktu dan kinerja pendamping PKH sudah bagus dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

**Kata kunci: Implementasi, Keadilan Sosial, Distribusi, Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan**

## **ABSTRACT**

**Nur Annisa K, 2023.** Implementation of the Principles of Social Justice in the Social Assistance of the Family Hope Program for the Community in Toddotoa Village, Gowa Regency. Supervised by Fatimah Azis and Yumriani

This study aims to determine the mechanism for distributing government social assistance to the community in Toddotoa Village, to determine the mechanism for distributing government social assistance to fulfill the principles of social justice for the community in Toddotoa Village, and to determine the response and level of community satisfaction with the distribution of social assistance for the Family Hope Program (PKH). The type of research used in this research is qualitative research with a case study approach. The research techniques used are observation, interviews and documents.

The results showed that in the distribution of social assistance the Family Hope Program (PKH) had a mechanism that started from data collection, socialization to distribution of aid, and withdrawal of assistance could be done at POS and Bank BNI, but in the distribution of assistance there were constraints, namely distance constraints due to the absence of ATMs BNI in Toddotoa Village. And the distribution of social assistance in Toddotoa Village has met the principles of social justice, and this family of hope program has a good impact because it can improve the community's economy but besides that it also has a negative impact because it makes the community dependent on the assistance provided so that the community cannot be fully independent. And the amount of assistance received varied or according to the category of recipients, and the distribution of assistance in Toddotoa Village was timely and the performance of PKH assistants was good and trustworthy in carrying out their duties.

**Keywords: Implementation, Social Justice, Distribution, Social Assistance, Family Hope Program**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Allamin Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa” dapat diselesaikan dengan baik Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi Magister Pendidikan Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Proses penyelesaian tesis ini merupakan suatu perjuangan panjang bagi penulis. Selama proses penelitian dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang di hadapi. Namun demikian, berkat semangat dan keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Karim dan ibu Rusni selaku orang tua penulis, kedua adikku Putri dan Jaiz serta seluruh teman terbaik terkhusus Isra, Ainun, Nasrah dan Nasriah. yang senantiasa mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya penulis tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Ambo Asse. M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd., Direktur Pascasarjana Unismuh Makassar. Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Sosiologi Unismuh Makassar, Dr. Fatimah Azis, M.Pd pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada kami.



Dr. Yumriani, M.Pd. Pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan koreksi selama penulis melakukan konsultasi penulisan tesis ini. Seluruh bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Pendidikan Sosiologi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Ibrahim, S.Pd selaku Sekretaris desa Toddotoa, Baharuddin sebagai pendamping PKH serta masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan yang telah memberikan izin dan menerima penulis untuk melakukan penelitian di Desa Toddotoa. Teman-teman angkatan Program Studi Magister Pendidikan Sosiologi yang selalu ada dalam kebersamaan selama perkuliahan, baik suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih terdapat beberapa kelemahan. Untuk itu penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat mengetahui kekhilafan dan dapat belajar dari kritikan tersebut. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa tesis ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak.

Makassar, Mei 2023

Nur Annisa K

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEAHLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERUNTUKAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Landasan Konsep dan Teori .....	12
1. Bagian Konsep.....	12
2. Bagian Teori.....	19

B. Kerangka Pikir.....	25
C. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	32
C. Instrumen Penelitian .....	33
D. Informan Penelitian .....	34
E. Jenis Data .....	35
F. Teknik Pengumpulan Data .....	35
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Triangulasi Data.....	39
I. Etika Penelitian .....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	42
B. Keadaan Geografis .....	43
C. Keadaan Demografi .....	43
D. Kondisi Ekonomi .....	46
E. Kondisi Pemerintahan .....	48
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
<b>A. Hasil Penelitian.....</b>	<b>51</b>
<b>1. Mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa .....</b>	<b>51</b>

a. Sosialisasi terhadap penerima bantuan sosial program keluarga harapan .....	51
b. Mekanisme distribusi bantuan program keluarga harapan terhadap masyarakat.....	53
<b>2. Mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa ....</b>	<b>55</b>
a. Distribusi bantuan sosial pemerintah dalam memenuhi prinsip keadilan sosial .....	55
b. Dampak setelah penyaluran bantuan program keluarga harapan.....	56
<b>3. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial PKH .....</b>	<b>58</b>
a. Jumlah bantuan program keluarga harapan yang diterima masyarakat.....	58
b. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan.....	61
<b>B. Pembahasan.....</b>	<b>63</b>
<b>1. Mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa .....</b>	<b>63</b>
<b>2. Mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa ....</b>	<b>68</b>
<b>3. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial PKH .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76

B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

NO Tabel	JUDUL	HAL
1.1.	Jumlah penerima PKH bulan Januari tahun 2023 di desa toddotoa .....	8
1.2.	Jumlah penduduk .....	44
1.3.	Tingkat Pendidikan .....	44
1.4.	Mata pencaharian .....	45
1.5.	Kepemilikan ternak .....	45
1.6.	Prasarana desa .....	46
1.7.	Data penerima bantuan program keluarga harapan .....	83
1.8.	Skema jumlah bantuan PKH berdasarkan komponen .....	88



## DAFTAR GAMBAR

No Gambar	JUDUL	HAL
2.1.	Kerangka Pikir.....	28
2.2.	Mekanisme pelaksanaan PKH.....	89



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	JUDUL	HAL
1.	Data tentang PKH .....	83
2.	Pedoman Wawancara.....	90
3.	Dokumentasi.....	115





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Isu kemiskinan bukan hanya menjadi isu nasional tetapi sudah menjadi isu global yang menjadi perhatian bersama. Indonesia adalah Negara yang penduduknya berada di empat terbesar di dunia. Mempunyai populasi dengan penduduk yang sangat besar dan ini menjadikan Indonesia memiliki beraneka ragam permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat, salah satunya yaitu kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang bisa membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi segala kebutuhannya diantaranya dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat dipahami dengan sederhana yakni keadaan dimana seseorang mengalami kekurangan uang, tingkat pendapatan yang rendah, serta kebutuhan dasar hidup sehari-hari tidak terpenuhi.

Kemiskinan merupakan keadaan yang terjadi karena ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Ada dua faktor penyebab terjadinya kemiskinan yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu faktor dari dalam seperti kepribadian, sikap, pengalaman dan pengamatan, konsep diri, motif dan persepsi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor dari luar diantaranya keluarga, referensi, kelas sosial dan kebudayaan.

Masalah kemiskinan sudah ada sejak dahulu, di Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan agar tidak semakin meningkat hal ini sudah di atur dalam peraturan presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi fokus utama pemerintah di dalam menyusun kebijakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti perlu ada integrasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai stake holder yang terkait (Rakhmat, 2019).

Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018 merupakan landasan hukum tentang Program Keluarga Harapan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan PKH diatur dan dijelaskan di dalam Permensos tersebut. Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Di dalam Permensos No 1 Tahun 2018 juga disebutkan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat

adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan (Rismana, 2019).

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan serta mensejahterahkan kehidupan rakyat. Dalam mencapai kesejahteraan hidup masyarakat, pemerintah memiliki tugas untuk membuat perencanaan serta melaksanakan program yang tepat untuk masyarakat. Dalam memberikan bantuan seperti halnya pencairan dana sangat dibutuhkan demi keberlangsungan hidup keluarga miskin, selain dari itu pengadaan pembekalan keterampilan dengan melalui pemberdayaan juga bisa memberikan kemampuan dasar bagi keluarga.

Melihat keadaan tersebut, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah membuat program bantuan tunai bersyarat (BTB) namun kini dikenal dengan program keluarga harapan (PKH). Program yang sama sudah dilaksanakan dan bisa dikatakan cukup berhasil di beberapa negara yang dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program keluarga harapan (PKH) bukan kelanjutan dari program subsidi langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Faktor penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) ini yaitu partisipasi, sarana dan prasarana (Putri, 2019).

Tujuan dari program keluarga harapan (PKH) yaitu untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang menerima bantuan ini memiliki akses yang lebih baik dalam memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, ketidak

berdayaan, dan keterasingan sosial yang erat kaitannya dengan identitas warga miskin. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) adalah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH memiliki fungsi yaitu memberikan income effect kepada rumah tangga sangat miskin dengan cara mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan (Sari, 2020).

Sebagai suatu program bantuan sosial bersyarat, program keluarga harapan memberikan akses keluarga miskin terutama pada ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang telah tersedia di dekat mereka. Fungsi program keluarga harapan (PKH) juga sudah memasuki dan mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tetap memperhatikan serta mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI (Hidayatulloh, 2019).

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan dengan mekanisme sebagai berikut: 1) Rekening penerima bantuan sosial dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI ke Bank Penyalur. 2) Pembukaan rekening diikuti dengan pencetakan buku tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera serta

PIN Mailer. 3) Sosialisasi dan edukasi Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan aktivitas untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait tentang penyaluran bantuan social secara non tunai. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Kemensos RI bersama Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. 4) Distribusi KKS kepada KPM Bank penyalur melakukan kegiatan penyerahan KKS, buku tabungan dan PIN mailer kepada penerima manfaat PKH. Untuk kelancaran pendistribusian KKS dan buku tabungan Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. 5) Proses penyaluran bantuan sosial KPM Penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari pemberi bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial melalui bank penyalur. 6) Penarikan dana bantuan sosial PKH Penarikan dana bantuan sosial PKH adalah kegiatan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan di layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen bank dan e-warong. 7) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH Merupakan kegiatan pencocokkan dan pengecekan administrasi, data dan dana hasil penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara berjenjang antara pelaksana PKH dengan bank penyalur.

Kegiatan pengecekan data penyaluran dilakukan menggunakan aplikasi e-PKH oleh SDM PKH pada setiap KPM PKH yang telah menerima bantuan, ataupun yang belum menerima bantuan. Pada saat pengecekan data penyaluran KPM, SDM PKH memberikan informasi KPM melakukan pencairan atau tidak melakukan pencairan. SDM PKH memberikan informasi penyebab KPM tidak

dapat melakukan pencairan sesuai ketentuan yang berlaku. 8) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Sosial Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pelaksana PKH di daerah dan Bank Penyalur untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh KPM.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada rakyat bahwa dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Sulkarnain, 2021)

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berarti Pancasila adalah kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia serta digunakan oleh bangsa Indonesia. Pancasila berisi berbagai gagasan yang mampu menjawab sejumlah persoalan dasar dari sebuah bangsa yang hendak merdeka sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi gagasan bersama dalam arti diterima sebagai bentuk kesepakatan di atas gagasan-gagasan lainnya mengenai hidup berbangsa dan bernegara. Membentuk suatu ideologi yang menjadi cermin cara berpikir bangsa Indonesia, tetapi juga menjadikan bangsa Indonesia menuju cita-cita yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ideologi bukan sebuah pengetahuan teoretis belaka tapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi sebuah keyakinan akan sebuah gagasan. (Febriansyah, 2017)

Dalam menjalankan tugasnya pemerintah harus selalu berlaku adil, karena setiap orang harus mendapatkan haknya dan tidak boleh mengambil apa yang telah menjadi hak orang lain. Seperti halnya ketika memberikan bantuan kepada masyarakat hendaknya berlaku adil, jujur, amanah dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) merupakan realisasi keadilan sosial untuk masyarakat yang para peserta penerima bantuan dibiarkan dengan sukarela menggunakan segala hal yang menjadi hak-hak dasar setiap individu. Hak dasar tersebut dapat berupa akses mengenyam pendidikan, akses memperoleh kesehatan, pemberian bantuan berupa pangan serta mereka juga diwajibkan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Persyaratan penerima bantuan PKH yaitu masyarakat miskin dan mempunyai komponen. Masyarakat yang dapat menerima bantuan PKH merupakan masyarakat yang berada pada kluster terendah sehingga dapat dikatakan sumber daya manusia (SDM) dengan tingkatan rendah. Bagaimana mungkin sumber daya manusia (SDM) dengan tingkatan rendah tersebut bisa dengan baik dalam mengeluarkan pendapat, ikut dalam organisasi politik. Maka dari itu program keluarga harapan lebih kepada memenuhi hak-hak dasar berupa pendidikan dan kesehatan. (Kartikasari, 2019)

Di Indonesia keluarga fakir miskin sangat banyak mulai yang memang betul-betul miskin sampai kepada orang yang hanya mengaku miskin supaya mereka bisa mendapatkan bantuan. Karena banyak masyarakat miskin maka dari itu perlu pendataan serta mengklarifikasi agar bantuan PKH benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Maka dari itu

dalam pendistribusian bantuan sosial PKH harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

Table 1.1. Jumlah penerima PKH bulan Januari tahun 2023 di desa Toddotoa

NO	DUSUN	JUMLAH
1.	Toddopuli	26
2.	Tallang-Tallang	21
3.	Marodeng	23
4.	Bonto Te'ne	25
5.	Borong Karamasa	59
JUMLAH		154

*Sumber: pendamping PKH desa Toddotoa*

Begitupun di Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa guna dalam angka meminimalisir kemiskinan pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial PKH dimana masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH harus terdaftar dalam penerima bantuan sosial bersyarat yang dalam hal ini diwajibkan memenuhi prinsip keadilan sosial yang sesuai dengan pancasila. Dikarenakan banyak pihak yang tidak seharusnya mendapat bantuan sosial PKH tetapi datanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial sedangkan ada pihak yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut namun datanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH. Dengan adanya bantuan sosial program keluarga harapan ini dalam pendistribusiannya diharapkan bisa adil dan merata dan yang mendapatkan



bantuan PKH betul-betul adalah orang yang sesuai dengan syarat dan kriteria penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi prinsip keadilan sosial pada bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa?
2. Bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa?
3. Bagaimana respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial PKH?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa.
2. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa.
3. Untuk mengetahui respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial PKH.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini berkaitan pada sumbangsi peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap pengembangan teori dan ilmu pengetahuan. Penelitian ini akan diterbitkan sebagai jurnal sehingga diharapkan memberikan sumbangsi untuk ilmu pengetahuan dan Pendidikan sebagai bahan referensi peneliti-peneliti selanjutnya yang mempunyai objek penelitian yang sama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang implementasi prinsip keadilan sosial pada bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa
- 2) Bagi masyarakat penerima bantuan PKH, penelitian ini diharapkan bisa meberikan informasi terkait dengan program keluarga harapan serta bisa mempergunakan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya.
- 3) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni berdasarkan pengalaman penelitian yang diperoleh maka peneliti dapat menjadi mentor atau narasumber serta memberikan sumbangsi pemikiran dan bahan pertimbangan dalam suatu kebijakan bagi mahasiswa dalam hal penulisan karya tulis ilmiah.

## E. Definisi Operasional

### 1. Implentasi

Implementasi adalah penerapan suatu kegiatan atau rencana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.

### 2. Keadilan Sosial

Keadilan sosial yaitu keadilan yang menjadi hak bagi seluruh warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.

### 3. Distribusi

Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting, distribusi merupakan proses dalam menyalurkan barang atau jasa agar sampai pada penerima barang tersebut.

### 4. Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentang baik itu berupa uang, barang atau jasa.

### 5. PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program perlindungan atau pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH.

### 6. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok individu-individu yang memutuskan untuk hidup bersama yang terbentuk karena hubungan anggota-anggotanya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konsep dan Teori**

##### **Bagian Konsep**

##### **1. Implementasi**

Implementasi adalah proses dalam melaksanakan suatu kebijakan ketika ingin melakukan kegiatan sehingga yang termasuk kedalam pelaksanaan dapat mengetahui bahwa apa yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang kebijakan tersebut tetapkan. Pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berbagai bentuk program yang dibangun oleh pembuat kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif yaitu sebuah kondisi yang bisa dibangun dari pengetahuan dan pengalaman dari orang yang ada di garis depan pemberi layanan.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. (Muhammad Ali Rofin1, 2023)

Implementasi dapat diterapkan di berbagai bidang. Adapun tujuan dari implementasi adalah sebagai berikut: a) Menciptakan rancangan sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi membutuhkan proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan agar

sistem bisa bekerja dengan tepat. b) Melakukan uji coba untuk peraturan yang akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem tersebut. c) Menyempurnakan system yang telah disepakati. d) Memprediksikan kebutuhan penggunaan terhadap system yang dibuat.

Selain tujuan diatas, implemntasi juga memiliki faktor yang bisa mempengaruhi implentasi antara lain: a) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. b) Jenis manfaat yang diterima oleh target group. c) Progres perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Untuk variabel lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi antara lain: a) Besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para pelaku yang terlibat dalam implementasi tersebut. b) Karakter institusi dan rezim yang berkuasa. c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## 2. Keadilan Sosial

Konsep keadilan sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh para ahli karena keadilan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat dekat mengenai pemenuhan hak-hak serta yang menjadi kepentingan manusia. Didalam konsep keadilan banyak sekali ditemukan berbagai pengertian oleh para ahli mengenai keadilan, adil berarti meletakkan segala sesuatu yang sesuai dengan proporsinya. Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan perwujudan dari fairness (kejujuran/keadilan/kewajaran); balance (keseimbangan); temperance (menahan diri) dan straight forwardness (kejujuran). (Surono)

Darmodihardjo dan Sidharta mengemukakan bahwa keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keadilan yang diberlakukan untuk masyarakat di segala bidang kehidupan baik menyangkut materiel ataupun spiritual yakni yang bersangkutan adil di berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan. Keadilan sosial juga meliputi berbagai hal keadilan dalam memenuhi segala tuntutan-tuntutan hakiki yang menjadi bagian kehidupan jasmani dan rohani. Keadilan sosial juga bisa disebut sebagai keadilan yang berlaku didalam masyarakat diberbagai bidang kehidupan baik berupa materiel ataupun spiritual. Yang berarti keadilan bukan hanya untuk orang yang kaya tetapi juga untuk orang miskin, dan bukan pula hanya untuk pemimpin melainkan juga untuk yang dipimpinnya. (Surono)

Menurut Soerjanto Poespowarjo keadilan sosial ada pada hakekat keadilan yang mengakui serta berlaku baik kepada sesama manusia. Keadilan juga mencerminkan hubungan antar manusia yang terwujud dalam tiga bentuk yaitu *justitia commutativa*, *justitia distributiva* dan *justitia legalis*. Keadilan sosial yang ada dalam tiga bentuk tersebut terwujud bukan karena semata-mata terjadi karena kesadaran manusia itu sendiri, tapi karena peraturan hukum yang mengarah pada struktur proses masyarakat, hingga jalan masyarakat untuk mendapatkan keadilan benar-benar terbuka lebar. Dengan demikian, bisa dijamin masyarakat akan mendapatkan pemerataan keadilan baik mengenai jasmani maupun hukum. Begitupun keadilan sosial dalam hal mendapatkan bantuan sosial masyarakat, terutama orang miskin akan

mendapatkan haknya melalui program pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar sebagai penerima bantuan PKH akan mendapatkan hak-haknya dan mereka bisa menggunakan hak tersebut dengan baik. (Suroño)

### 3. Bantuan sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial merupakan bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, yang bertujuan agar mereka bisa meningkatkan hidup secara wajar. Program bantuan sosial adalah salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang peduli pada kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini adalah bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu. (Wahidah, 2022)

Adapun beberapa program bantuan sosial dari pemerintah untuk rakyat yakni mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Namun Dalam hal ini akan fokus membahas mengenai bantuan sosial program keluarga harapan (PKH). 1) Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anaknya. 2) Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014), menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta KPM tahun 2018. 3) Nilai bansos yang diterima KPM adalah Rp 1.890.000,-/tahun/KPM.



#### 4. PKH

Menurut Peraturan Menteri no 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau orang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). (NURISMA, 2021)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat miskin atau rentan yang datanya terdaftar pada data terpadu program penanganan fakir miskin, yang dikelola oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Adapun mekanisme bantuan sosial program keluarga harapan beragam harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti bantuan sosial berupa dana tunai PKH bisa diberikan pada ibu ataupun perempuan dewasa diantaranya nenek, bibi serta kakak perempuan dan kemudian dikatakan Pengurus Keluarga dana yang telah diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan para penerima bantuan sosial PKH.

PKH (Program Keluarga Harapan) memiliki tujuan yakni: 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima bantuan dengan cara mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 2) Meringankan beban yang

dikeluarkan serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan keluarga miskin dan rentan; 3) Membuat perubahan terhadap perilaku serta memandirikan Keluarga Penerima bantuan dalam hal mengakses berbagai layanan seperti kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; 4) Menimalisir angka kemiskinan dan kesenjangan; dan 5) Mengenalkan fungsi produk dan jasa keuangan formal terhadap Keluarga Penerima bantuan.

#### 5. Jenis / Kriteria Program Keluarga Harapan

Kriteria peserta PKH merupakan keluarga miskin yang memenuhi salah satu syarat seperti berikut: 1) Mempunyai komponen kesehatan yaitu anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu hamil atau menyusui, dan termasuk didalamnya anak penyandang disabilitas ringan atau sedang. 2) Mempunyai unsur pendidikan anak usia sekolah 6 sampai 21 tahun bagi peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas ringan atau sedang. 3) Memiliki unsur kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat di dalam keluarga peserta PKH. 4) Mempunyai unsur kesejahteraan sosial bagi yang lanjut usia 70 tahun ke atas di dalam keluarga peserta penerima bantuan PKH.

PKH dengan kriteria: a). Yang dalam tahap lanjut usia berkisaran 70 tahun ke atas per 1 Januari pada tahun yang tervalidasi. b). Yang dalam tahap lanjut Usia berkisaran 70 Tahun keatas yang ada didalam keluarga Penerima bantuan PKH. c). Yang lanjut usia dengan kisaran 70 tahun ke atas yang menjadi orang tua yang mengurus keluarga PKH. (Pedoman Pelaksanaan PKH Kemensos RI, 2016)

Penyandang Disabilitas Berat yaitu mereka yang mempunyai keterbatasan mental, fisik serta intelektual atau sensorik dengan jangka waktu lama kedisabilitasinya sudah tidak lagi bisa direhabilitasi, tidak lagi mampu melakukan aktivitas hidupnya sehari-hari atau sepanjang hidupnya tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain, tidak lagi bisa menghidupi dirinya sendiri, dan tidak bisa ikut dalam berpartisipasi secara penuh serta efektif didalam masyarakat berlandaskan kesetaraan dengan yang lainnya (Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, 2015). (Kusumawardani, 2021)

### **Bagian Teori**

Setiap penulisan akan dibutuhkan teori sebagai landasan berfikir supaya penulis mampu melakukan penulisan secara maksimal dengan segala daya dan upaya dalam penelitiannya dengan sebuah teori. Juga dengan sebuah teori maka akan mempermudah penulis dalam melakukan upaya pengkajian terhadap peristiwa-peristiwa masa lampau. Pada penelitian ini menggunakan teori keadilan dari Aristoteles, teori sistem sosial dan teori strktural fungsional Talcot Persons dan teori konflik Karl Marx.

#### **1. Teori keadilan Aristoteles**

Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan

yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Hal ini bisa dikatakan adil bila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. (Nasution, 2014)

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses menikmati tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya,

maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif. obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (Nasution, 2014)

Di dalam konsep keadilan distributif muncul pertanyaan atau masalah tentang kapan timbulnya hak tersebut dan bagaimana pembagian hak itu, apa harus merata atau harus proporsional?. Berbeda dengan keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya. Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut

dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya. orang-orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional. Dalam hal yang demikian tentu saja konsep persamaan itu diartikan dalam bentuk yang proporsional, karena tidak mungkin diberikan hak-hak yang secara aritmatik sama mengingat kontribusinya berbeda. Keadilan komutatif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum, sebab disini dituntut adanya kesamaan dan yang dinilai adil ialah apabila setiap orang dinilai sama oleh karena itu sifatnya mutlak. Dari konstruksi konsep keadilan Aristoteles tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa keadilan distributif merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebankan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan kedalam suatu Undang-undang. (Nasution, 2014)

Keterkaitan teori keadilan Aristoteles dengan penelitian ini yaitu dalam teori keadilan dibedakan menjadi dua yaitu keadilan distribusi dan keadilan komunkatif. Yang jika dihubungkan dengan implementasi prinsip keadilan sosial

pada distribusi bantuan sosial PKH pemerintah terhadap masyarakat, maka dalam pemberian bantuan sosial haruslah merata dan setiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam hal ini berupa bantuan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Teori Sistem Sosial

Teori sistem sosial menjelaskan tentang dinamika organisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial- hubungan dan interaksi orang didalam dan diuar organisasi. Blau dan Scott (1962) mengenalkan dua prinsip dasar yang membantu mendefinisikan sistem sosial. Salah satunya adalah susunan hubungan-hubungan sosial, atau pola-pola dari interaksi-interaksi sosial didalam sistem sosial. Yang lain adalah budaya, atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang di dalam sistem sosial.

Teori sistem sosial segala hubungan-hubungan pola-pola yang ada didalam suatu sistem merupakan bagian dari teori sistem sosial serta interaksi didalamnya sesuai yang dikatakan Blau dan Scott (1962). Didalam penelitian pola-pola interaksi atau hubungan antara pendamping PKH dengan masyarakat adanya interaksi atau hubungan yang terjalin sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan ini bisa berjalan dengan lancar, dimulai dari pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH sampai dengan penyaluran bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendistribusian program bantuan sosial ini terdapat sistem sosial didalam hubungan serta pola-pola interaksi sosial terdapat didalamnya. Hal ini berguna untuk mengingat bahwa susunan hubungan sosial

dan budaya dari organisasi dapat dilihat secara formal, informal atau holistik. Struktur sosial ditentukan oleh jenis interaksi sosial, antara orang dengan berbagai status dalam organisasi. Tindakan Sosial mengacu pada jenis dan tingkat interaksi di antara mereka dalam sebuah organisasi, apakah mereka lebih tinggi, rendah, atau berorientasi pada teman sebaya. Seperti, penting untuk dicatat bagaimana sering dan panjangnya orang berinteraksi antara satu dengan yang lain didalam organisasi tersebut dan alasan apa diskusi telah diadakan (Nasikin. 2006).

### 3. Teori Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons

Permasalahan penelitian ini mengarah pada paradigma fakta sosial dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural dari Talcot Parsons. Dimana teori Parsons ini terkenal dengan skema AGIL. AGIL fungsi adalah “suatu gagasan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan system” (Rocher, 1975:40). Parsons percaya bahwa ada empat imperative fungsional yang diperlukan (atau menjadi ciri) seluruh sistem yaitu: 1) *Adaptasi*: sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya. 2) *Pencapaian tujuan*: sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. 3) *Integrasi*: sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Iapun harus mengatur hubungan antar ketiga imperative fungsional tersebut (A, G, L). 4) *Latensi (pemeliharaan pola)*. Sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.



Teori fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dimana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lain. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisme yang terdapat dalam biologi. Asumsi dari teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Keterkaitan teori dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial PKH pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa yakni adanya kerja sama antara pendamping dengan aparat setempat sehingga dapat meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan sosial untuk lansia dan juga disabilitas. Meringankan beban yang dikeluarkan serta meningkatkan taraf hidup penerima bantuan keluarga miskin dan rentan sehingga tujuan dari program keluarga harapan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

## **B. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan alur berfikir peneliti dalam penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini penulis membahas permasalahan pokok yang telah

dirumuskan. Permasalahan tersebut akan dijelaskan dengan menggunakan konsep dan teori yang ada hubungannya untuk menjawab masalah penelitian.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan maka pemerintah mengeluarkan suatu program dengan tujuan menimalisir kemiskinan yang terjadi di Indonesia, program tersebut yaitu program keluarga harapan (PKH). Tujuan Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban ekonomi KPM (keluarga penerima manfaat) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

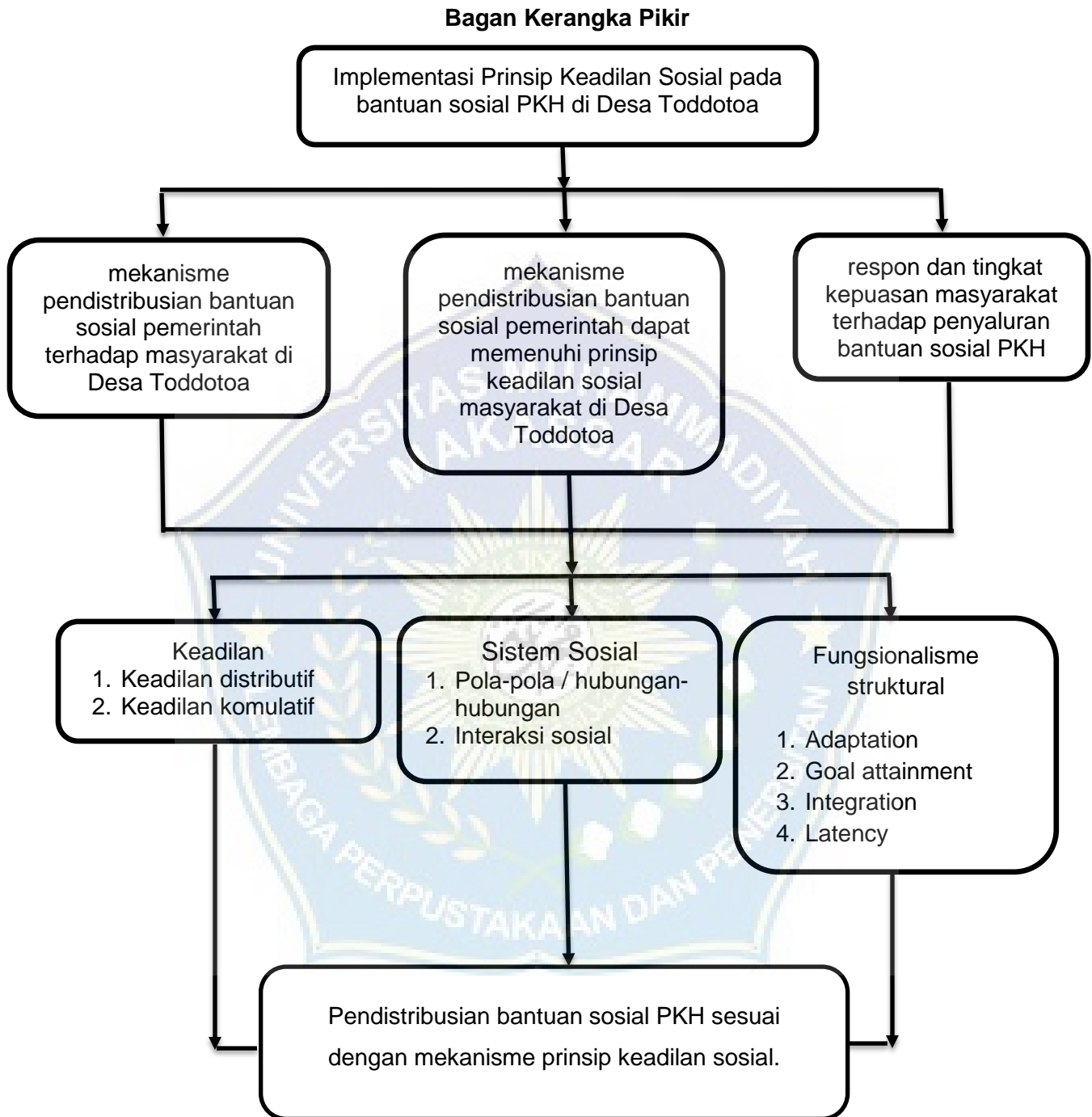
Sebagaimana teori keadilan menyatakan bahwa pendistribusian bantuan sosial haruslah merata dan masyarakat harus mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sudah memenuhi prinsip keadilan sosial karena para penerima bantuan program keluarga harapan memang betul-betul orang yang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria dan syarat penerima bantuan serta datanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dalam teori sistem sosial menyatakan bahwa dalam pendistribusian bantuan sosial PKH haruslah memiliki hubungan pola-pola seperti yang ada dalam suatu sistem yaitu adanya hubungan antara pendamping dengan masyarakat penerima bantuan PKH yang saling berinteraksi, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam distribusi bantuan sosial, agar mampu meningkatkan pelayanan pendamping PKH. Dimulai dari sosialisasi yang dilakukan pendamping PKH, pendataan sampai pada penyaluran bantuan program keluarga harapan,

dan masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) juga ikut berpartisipasi dengan mengikuti rapat yang dilakukan sebelum bantuan tersebut dicairkan. Serta tujuan dikelurkannya bantuan sosial PKH agar bisa terlaksana dengan baik dan merata sehingga mampu menimalisir angka kemiskinan yang telah menjadi masalah didalam masyarakat. Dimana program ini memiliki beberapa jenis bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria sebagai penerima bantuan.

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme dan implementasi pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa dan apakah mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah tersebut memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat. Serta bagaimana respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial PKH. Dengan dilakukannya penelitian ini besar harapan agar kedepannya distribusi bantuan sosial dapat tersalurkan secara adil dan merata.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

### C. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Indah Sari. 2020, “Analisis implementasi program keluarga harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Indah Sari adalah Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penetapan peserta PKH, serta tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Kemudian ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping PKH dan peserta PKH antara lain: belum adanya kesadaran dari peserta, kurangnya sosialisasi dari pendamping, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.

Penelitian relevan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tety Thalib. 2020, “implementasi program keluarga harapan (PKH) di Desa Pongogaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Tety Thalib adalah Hasil penelitian tentang sistem pendataan Program Keluarga Harapan di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi tidak terdata, sebaliknya masyarakat yang yang taraf hidup lebih baik tetapi terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan. Sistem verifikasi Program PKH di Desa Pongongaila belum optimal. Hal ini terlihat dari

tidak transparannya petugas dalam melakukan kegiatan verifikasi yang menimbulkan kecurigaan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak lolos verifikasi. Pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) belum optimal. Hal ini terlihat dari banyak pelanggaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), baik pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan pendataan ataupun verifikasi maupun pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) seperti penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Disarankan, perlunya upaya perubahan dalam sistem pendataan khususnya pada petugas dengan melibatkan orang-orang independen atau petugas yang berasal dari luar Desa Pongongaila. Perlunya dilakukan upayan yang terbuka dan jujur dalam sistem verifikasi berkas calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Perlunya dilakukan pengawasan secara tuntas dengan melakukan pengecekan kebenaran atas kondisi yang dialami oleh masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abdul Manan. 2019, "implementasi program keluarga harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tahun 2018". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Abdul Manan menunjukkan bahwa: 1) Tahapan-tahapan implementasi program PKH di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi ada 5 tahap. Pertama, tahap persiapan berupa perekrutan pendamping, kedua tahap pengumpulan data

dan informasi calon KPM maupun KPM lama, ketiga tahap pelaksanaan yakni pertemuan kelompok (FDS); pemutakhiran data sosial ekonomi (PDSE); serta verifikasi komitmen, keempat tahap evaluasi dan kelima tahap terminasi berupa graduasi. 2) Faktor pendukung dalam implementasi program PKH di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah dukungan dari pemerintah yang menambahkan jumlah dana bantuan kepada KPM PKH, jiwa sosial pendamping yang ingin melakukan perubahan kepada masyarakat untuk maju. Faktor penghambat dalam implementasi program PKH di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah menanamkan jiwa disiplin dan mandiri pada KPM, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Dari ketiga penelitian relevan yang menjadi perbedaan yaitu fokus dari penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan Nur Indah Sari, 2020, berfokus pada analisis implementasi PKH untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tety Thalib, 2020, berfokus pada implementasi keluarga harapan (PKH). Dan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Manan, 2019, berfokus pada PKH dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu berfokus pada implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial PKH terhadap masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang di temukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, di mana penelitian mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Desa Toddotoa. Lokasi ini dipilih oleh penulis karena dilihat dari latar belakang, penelitian ini dilaksanakan yaitu mengarah pada implementasi prinsip keadilan sosial pada bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa.



## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam meneliti tentang implementasi prinsip keadilan sosial pada bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa adalah 1 bulan.

### C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan (Sugiono, 2010: 305-306).

Instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. lembar observasi, observasi yang digunakan untuk mengamati langsung objek penelitian di lapangan sehingga akan memperoleh data yang objektif dan lebih akurat sebagai bukti dan fakta penelitian yang cukup kuat. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi non partisipan yaitu proses pengamatan peneliti tidak mengambil bagian secara penuh dari aktivitas objek yang diteliti.
2. Pedoman wawancara, berupa pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Jika dilihat dari jenisnya, maka wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur (semistructure interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan

3. Instrumen dokumen, instrumen yang digunakan adalah berupa dokumen dalam bentuk dokumen/data, surat-surat, foto, rekaman, video pada saat melakukan penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

1. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah unsur yang penting dalam sebuah penelitian dengan fungsi memberikan informasi dan data kepada peneliti terkait sesuai masalah yang sedang diteliti. Penentuan informasi dalam penelitian ini ditetapkan secara sengaja (purposive sampling).

2. Data Informan

Untuk memperoleh sumber data yang tepat dan akurat peneliti menentukan klasifikasi informan. Beberapa klasifikasi informan yang telah ditentukan yaitu informan utama, informan kunci, dan informan tambahan.

- a) Informan Utama

Informan utama adalah Informan yang mengetahui tentang masalah yang akan diteliti serta dianggap paham terhadap permasalahan penelitian dan dianggap paling sesuai serta tepat ialah masyarakat Desa Toddotoa yang menerima bantuan PKH dari pemerintah yang terdiri dari 5 orang.

b) Informan Kunci

Informan kunci yaitu informan yang memiliki informasi secara menyeluruh, tepat, dan sebenar-benarnya, agar dapat menjawab tentang pertanyaan peneliti dan dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah pendamping PKH.

c) Informan Tambahan

Informan tambahan adalah individu maupun kelompok yang dijadikan sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan tambahan sebagai pelengkap yang tidak diberikan oleh informan utama dan informan kunci, dan informan tambahan dalam penelitian ini adalah sekretaris Desa Toddotoa.

### **E. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Dimana data primer peneliti mendapatkan sumber data langsung dari informan yang ada dilapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bacaan buku, telaah jurnal dan media sosial.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi yaitu langkah yang dilakukan peneliti agar mendapat gambaran yang jelas mengenai implementasi prinsip keadilan sosial pada bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa. Dengan mengamati dan mencatat secara langsung mengenai hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan objek yang sedang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian, peneliti mampu mendapat informasi langsung tentang gambaran lapangan yang akan membantu peneliti dalam merumuskan hasil penelitian.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada informan yang ditemukan di lapangan. Teknik wawancara ini dilakukan peneliti dengan cara mencatat informasi yang didapatkan berdasarkan pedoman wawancara yang telah di siapkan sebelumnya yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian agar mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.

Dalam mengupulkan data serta informasi yaitu menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang ada di lapangan, peneliti dihadapkan dengan beberapa masalah mendasar. Hal yang dapat mejadi kendala atau penghambat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan peneliti diantaranya adalah adanya hambatan dalam mencari informan untuk mendapatkan informasi berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti hal ini karena adanya ketakutan dari informan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan dokumen sebagai sumber data yang diperoleh berupa dokumen dalam bentuk dokumen/data, surat, foto, rekaman, video pada saat melakukan penelitian. Dokumen data seperti identitas atau data kelembagaan desa Toddotoa, data berupa file penerima bantuan program keluarga harapan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai melakukan pengumpulan data dalam waktu tertentu. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2021: 323) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data merupakan kegiatan merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mearinya bila diperlukan. Schatzman dan Strauss (Creswell, 2014) mengklaim bahwa analisis data kualitatif terutama memerlukan pengklasifikasian benda, orang, dan peristiwa dan sifat-sifat yang menjadi ciri mereka.
2. Penyajian Data adalah kegiatan mendisplay data agar data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan

sejenisnya. Creswell (2014) Pendekatan yang paling populer adalah dengan menggunakan bagian naratif untuk menyampaikan temuan analisis. Ini bisa berupa diskusi yang menyebutkan kronologis kejadian, pembahasan rinci beberapa tema (lengkap dengan subtema, ilustrasi spesifik, berbagai perspektif dari individu, dan kutipan) atau diskusi dengan tema yang saling terkait.

3. Penarikan Kesimpulan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek, hubungan kausal-interaktif, hipotesis atau teori, jika kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam analisis data di penelitian ini yakni pertama, reduksi data. Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori. Data- data mengenai laporan implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial PKH pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa diklasifikasikan berdasarkan kategorinya.

Kedua, penyajian data. Setelah data-data mengenai implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial PKH pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Dikumpulkan dan dikategorikan maka langkah selanjutnya data tersebut ditafsirkan. Pengertian interpretasi itu sendiri ialah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoretis terhadap data yang telah dikategorikan.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Dalam arti lain setelah semua ditafsirkan

dalam sebuah tulisan, maka tahap akhirnya itu mengambil suatu kesimpulan dengan melakukan interpretasi sesuai dengan maksud yang terkandung dalam penelitian tersebut. Setelah data-data implementasi prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial PKH pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa. Ditafsirkan maka langkah selanjutnya ialah data-data tersebut akan disimpulkan sehingga kesimpulan tersebut bias menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian.

#### **H. Triangulasi Data**

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbedabeda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan sumber, metode dan teori:

1. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-

masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi waktu. Triangulasi waktu digunakan untuk mengecek validitas data yang berkaitan dengan perubahan dalam proses serta perilaku manusia, karena perilaku manusia akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sehingga untuk mendapatkan data yang sah maka dapat dilakukan melalui observasi, peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja
3. Terakhir adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda. (M, 2010)

### **I. Etika Penelitian**

Etika penelitian adalah standar tata perilaku peneliti selama melakukan penelitian, mulai dari menyusun desain penelitian, mengumpulkan data lapangan



(melakukan wawancara, observasi, dan pengumpulan data dokumen), menyusun laporan penelitian hingga mempublikasikan hasil penelitian, misalnya:

- a) menginformasikan tujuan penelitian kepada informan
- b) meminta persetujuan informan (informant consent)
- c) menjaga kerahasiaan informan, jika penelitiannya dianggap sensitif
- d) meminta izin informan jika ingin melakukan perekaman wawancara, atau mengambil gambar informan.



## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Lokasi Penelitian**

Secara Historis, Desa Toddotoa dahulu adalah hasil pemekaran dari Desa Pallangga. Oleh para pemuka agama dan tokoh masyarakat memberikan nama Toddotoa yang diambil dari kesepakatan bersama. Dan nama Toddotoa berawal dari Keputusan Bersama yang berasal dari dua suku kata yaitu “Toddo” dan “Toa” yang kemudian diberi nama Desa Toddotoa.

Desa Toddotoa terbentuk sejak tanggal 29 September 1989 sebagai Desa Persiapan. Kemudian Desa Toddotoa menjadi desa defenitif pada tahun 1992. Sejak terbentuknya Desa Toddotoa sudah beberapa kali dipimpin oleh kepala desa terpilih sebagai berikut:

1. Kepala Desa pertama

Muhajir (1989 - 2000 ),

2. Kepala Desa kedua

Abd Rauf Dg Rani ( 2001 - 2011 ),

3. Kepala Desa ketiga

Saliruddin Dg Ngalle ( 2012-2018 ) Periode Pertama

Saliruddin Dg Ngalle ( 2018-2024) Periode Kedua

## B. Keadaan Geografis

Secara administrasi Desa Toddotoa terletak di wilayah Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Wilayah Desa Toddotoa secara administratif dibatasi oleh wilayah-wilayah desa-desa tetangga sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kelurahan Parangbanoa Kec.Pallangga
- Sebelah Timur : Desa Kampili Kec.Pallangga
- Sebelah Selatan : Desa Julubori Kec.Pallangga
- Sebelah Barat : Desa Pallangga Dan Bunga Ejaya Kec.Pallangga

Luas wilayah Desa Toddotoa adalah 2,23 km<sup>2</sup> dan jarak dari pusat kota yakni Kecamatan Pallangga adalah 6 km<sup>2</sup> di mana wilayah itu memiliki 5 dusun yaitu Dusun Toddopuli, Dusun Tallang-Tallang, Dusun Marodeng, dan Dusun Bonto Te'ne dan Dusun Borongkaramasa.

## C. Keadaan Demografi

### 1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

#### a) Jumlah Penduduk

Desa Toddotoa mempunyai jumlah penduduk 3286 Jiwa, yang tersebar dalam 5 dusun dengan perincian sebagaimana tabel:

Tabel 1.2: Jumlah Penduduk

No	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1	Toddopuli	365	330	695
2	Tallang-Tallang	294	287	581
3	Marodeng	287	291	578
4	Bonto Te'ne	280	263	543
5	Borongkaramasa	397	492	889
<b>Jumlah</b>		1623	1663	3286

Sumber : Monografi Desa Toddotoa Tahun 2023

Jumlah penduduk di desa Toddotoa yaitu 3286 jiwa, laki-laki berjumlah 1623 jiwa dan perempuan berjumlah 1663 jiwa.

b) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Toddotoa adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3: Tingkat Pendidikan

Belum Sekolah	Tidak Tamat SD	Perguruan Tinggi	SD	SMP	SMA
347	620	175	980	591	327

Sumber : Monografi Desa Toddotoa Tahun 2023

c) Mata pencaharian

Mata pencaharian terbanyak di Desa Toddotoa adalah Buruh harian, data selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.4: Mata Pencaharian

<b>Petani</b>	<b>Buruh Harian</b>	<b>Buruh Lepas</b>	<b>Jasa Angkutan</b>	<b>PNS</b>
1232	529	687	84	42
<b>Pedagan g</b>	<b>Tni/Polri</b>	<b>Pegawai Swasta</b>	<b>Wiraswasta</b>	
160	30	100	176	

Sumber : Monografi Desa Toddotoa Tahun 2023

d) Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Toddotoa sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan, pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

e) Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak penduduk Desa Toddotoa adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5: Kepemilikan Ternak

<b>Ayam Kampung</b>	<b>Ayam Broiler</b>	<b>Sapi</b>	<b>Kambing</b>	<b>Itik</b>	<b>Angsa</b>
210	590	52	5	50	21

Sumber : Monografi Desa Toddotoa Tahun 2023

## f) Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Toddotoa secara garis besar adalah sebagai berikut

Tabel 1.6: Prasarana Desa

Balai Desa	Jalan Prov	Jalan Kab.	Jalan Kec.	Mesjid DII
1	0 Km	4 Km	0 Km	7

Kantor Pemerintah	Sekolah			
	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMU
1	2	2	-	-

Sumber : Monografi Desa Toddotoa Tahun 2023

#### D. Kondisi Ekonomi

##### 1. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Toddotoa merupakan asset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai Buruh Harian, Petani, dan Pedagang di Desa Toddotoa banyak tumbuh usaha-usaha lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

##### 2. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari

pemerintah, sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

#### a) Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

##### 1) Sarana Jalan

- Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota sudah dilakukakanpengaspalan.
- Jalan Tani untuk tiap Dusun belum semuanya dilakukan perkerasan danataupun di rabat beton.
- Jalan Dusun untuk tiap dusun masih ada yang belum dilakukan perkerasan dan atau pun dirabat beton

##### 2) Sarana Irigasi

Saluran irigasi yang ada Di Desa Toddotoa system irigasi tekhnis sehinggal saluran irigasi sudah berjalan lancar.

##### 3) Sarana Telekomunikasi dan informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. Email sebagai sarana menyampaikan aspirasi dengan alamat :[ibe03toa@gmail.com](mailto:ibe03toa@gmail.com)

## **E. Kondisi Pemerintahan**

### **1. Pembagian Wilayah Desa**

Desa Toddotoa terbagi ke dalam 5 Wilayah Dusun dan 11 RW 22 RT

Yaitu sebagai berikut:

1. Dusun Toddopuli
2. Dusun Tallang-Tallang
3. Dusun Marodeng
4. Dusun Bonto Te'ne
5. Dusun Borongkaramasa

### **2. Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH). Pada saat ini tingkat pendidikan masyarakat Desa Toddotoa terdiri dari lulusan SD sebesar 60%, lulusan SMP sebesar 45%, SMA serta lulusan Perguruan Tinggi sebesar 74 %. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Toddotoa yang harus mendapat perhatian adalah: (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.



### **3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Toddotoa juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa Toddotoa.

Jumlah masyarakat yang menjasi sasaran KKS di Desa Toddotoa menurut data KKS Tahun 2016 sebanyak Keluarga yang terdiri dari 311 KK. Berdasarkan data tersebut, permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Toddotoa adalah: (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Toddotoa supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

### **4. Isu Strategis**

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Toddotoa adalah sebagai berikut: a) perwujudan kemandirian desa. b) perwujudan kemakmuran hidup masyarakat yang madani. c) perwujudan tingkat

sumber daya manusia secara optimal



**BAB V**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa**

- a. sosialisasi terhadap masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan

program keluarga harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan tujuan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan. Adapun beberapa sasaran program keluarga harapan ini terdiri atas 3 aspek yaitu pertama, aspek kesehatan yang dituju kepada ibu hamil dan menyusui, anak balita. Kedua adalah aspek pendidikan, Ketiga adalah aspek kesejahteraan sosial, dengan sasaran para lansia serta masyarakat penyandang disabilitas. (Tusiono, 2017)

Sebelum distribusi bantuan program keluarga harapan dilakukan, pendamping program keluarga harapan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait syarat dan kriteria penerima bantuan program keluarga harapan. Adapun syarat dan kriterianya yaitu harus terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

*“Pertama awal masuknya itu tahun 2016 ada namanya undangan pertemuan awal, disitu mi kita sosialisasikan syarat dan kriterianya. Kalau di PKH itu kan bantuan bersyarat dimana persyaratannya itu ada 3 komponen yang pertama itu komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu ada yang namanya kategori ibu hamil dan balita, yang kedua komponen pendidikan ini ada anak SD, SMP dan SMA dan ketiga komponen kesejahteraan sosial itu disabilitas berat dan lansia 60 keatas dan harus terdaftar di DTKS kalau tidak terdaftar di DTKS*

*biar miskin bagaimanapun tidak akan menerima bantuan". (W.1 pendamping PKH BR. Rabu, 12 April 2023)*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan BR sebagai pendamping program keluarga harapan (PKH), dapat diketahui bahwa dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan para penerima bantuan tersebut harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan dan yang paling penting datanya harus terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu proses sikap mental masyarakat secara aktif menyumbangkan kreativitas dan prakarsanya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat melalui masyarakat yang, melaksanakan, menikmati, menilai, memelihara kualitas program tersebut.

Masyarakat dinilai sebagai salah satu faktor dalam keberhasilan pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan, dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH) agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam sosialisasi yang dilakukan sebelum bantuan disalurkan.

*"Ikut jaki selalu kalau ada rapat-rapat toh pasti ikut jaki kalau adaji kabar kalau rapatki hari rabu misalnya ikut semuaji anggotanya karena tidak mungkin kalau uangnya cepatki baru rapat-rapatnya tidak mau ki hadir jadi pasti hadir jaki semua, setiap ada penerimaan rapat ki dulu baru cair ki itu uanga". (W. 4. Masyarakat penerima bantuan PKH HN. Rabu, 03 Mei 2023)*

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH), masyarakat ikut berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif dengan mengikuti rapat yang dilakukan sebelum pendistribusian bantuan sosial disalurkan kepada penerima bantuan yang datanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Bukan hanya itu dengan ikutnya masyarakat berpartisipasi dalam rapat yang dilakukan masyarakat juga bisa mengeluarkan segala keluhan kesahnya terkait program keluarga harapan (PKH).

- b. Mekanisme distribusi bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat

Secara umum setiap bantuan sosial memiliki tahapan penyaluran yang sama yaitu pada proses pendataan KPM, pengiriman data ke Dinas Sosial, verifikasi dan pemutakhiran data, penginputan data ke dalam DTKS, pengecekan data, dan penetapan SK KPM. Perbedaannya hanya pada cara pengambilan bantuan sosial serta bentuk bantuan yang didapatkan.

*“Eh ini juga yang perlu, kan kalau di bank itu dia tidak mau menyalurkan itu kalau ada nama berbeda, beda huruf kah. Ada itu beberapa yang pernah masuk kodong, itu yang menjadi kendala ku sekarang karena dari kementerian sosial juga belum ada jawaban pasti jadi yah itu yang jadi kendala besar kami dan bukan ji juga Cuma di Gowa, karena waktu pertamanya kementerian sosial itu tahun 2021 ada 21 juta data lebih belum diperbaiki. Masih ada juga beberapa empat ki dalam KK tapi yang terdaftar datanya di DTKS Cuma tiga ini juga yang jadi kendala karena data penerima bantuan ini harus konet dengan dukcapil jadi ada juga masyarakat yang biar berapa kalimi dikasi tau bilang ki aktifkan ki nik ta ini juga yang menjadi masalah karena mereka juga menunggu dan kita lagi na suruh dan capil juga tidak mau kalau bukan orangnya sendiri”.* (W. 1. Pendamping PKH BR. Rabu, 12 April 2023)

Penyaluran bantuan PKH di seluruh Indonesia yaitu melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang sekaligus digunakan sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM). (Wahidah et al., 2022). Mekanisme pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) juga harus terhubung dengan dukcapil karena masyarakat tidak akan menerima bantuan kalau ada perbedaan nama baik itu dalam hal adanya perbedaan huruf, dan dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan ini melalui bank.

*“Iya itu distribusinya melalui penarikan tunai di agen atau di BNI”.*  
(W.7. sekretaris desa IB. Senin, 10 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan BR dan IB dapat disimpulkan bahwa dalam distribusi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di desa Toddotoa masyarakat bisa melakukan penarikan bantuan yang diberikan melalui agen ataupun bank BNI.

Namun dalam proses pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan juga mengalami beberapa hambatan seperti yang dikatakan oleh BR yang menjadi pendamping program keluarga harapan di Desa Toddotoa.

*“Terkendala jarak karena sekarang itu ada lagi yang lewat POS, dulu langsung masuk direkeningnya masing-masing kan ini bulan 3 kemarin itu ada yang pertama itu tahap satu mi dia terima di Bank BNI dan ada juga beberapa nama yang melalui POS”.* (W. 1. Pendamping PKH BR. Rabu, 12 April 2023)

Kendala yang dialami selama pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), yaitu terkendala jarak karena di Desa Toddotoa tidak adanya ATM, karena dulu bantuan yang diterima itu langsung masuk ke rekening mereka masing-masing namun sekarang ada yang melalui POS

dan di bank BNI jadi masyarakat penerima bantuan harus keluar ketika ingin mengambil uang yang mereka terima.

## **2. mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa**

### **a. Distribusi bantuan sosial pemerintah dalam memenuhi prinsip keadilan sosial**

Program Keluarga Harapan (PKH) salah satu bentuk perwujudan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan nilai keadilan sosial yang dibentuk pada tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga atau seseorang dengan kategori miskin dan rentan, yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Berdasarkan Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan Tahun 2020 PKH sebagai salah satu program yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai keadilan sosial memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan taraf hidup terhadap Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). (Agustina et al., 2022)

*“Kalau ini tergantung pola pandang, karena data itu sudah barang jadi yang datang otomatis disesuaikan sudah ada penilaian khusus dari yang menurunkan itu jadi mungkin sudah memenuhi prinsip tersebut”.*  
(W.7. sekretaris desa IB. Senin, 10 April 2023)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan IB sebagai sekretaris desa Toddotoa mengatakan bahwa prinsip keadilan dalam

pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) itu tergantung cara pandang orang lain karena data yang diperoleh itu sudah dipilah berdasarkan syarat dan kriteria penerima bantuan. Jadi beliau mengatakan bahwa mungkin sudah memenuhi prinsip keadilan sosial tersebut.

*“Iya adil mi. karena sesuai orang yang dapat bantuan itu sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH”.* (W. 2. Masyarakat penerima bantuan PKH AL. Sabtu, 1 Mei 2023)

Menurut informan AL sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) distribusi bantuan sudah adil karena sudah sesuai dan memenuhi prinsip keadilan sosial karena penyalurannya sesuai dengan kriteria penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

*“Itu yang tadi saya bilang mau miskin tidak miskin kalau masuk datanya di DTKS itu tetap terima bantuan. Biasanya kan Cuma dia terima PBI semua bantuan sosial itu PBI termasuk sembako, PKH. Itu sampai desil empat itu masih menerima, makanya ku bilang mau miskin tidak miskin kalau masuk datanya di DTKS itu pasti dapat bantuan”.* (W. 1. Pendamping PKH BR. Rabu, 12 April 2023)

Dalam program keluarga harapan (PKH), para penerima bantuan baik itu miskin maupun tidak miskin apabila datanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) tetap akan mendapatkan bantuan tersebut. Dan hal ini sampai desil empat masih menerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

b. dampak setelah penyaluran bantuan program keluarga harapan

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, antara lain pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai



kementerian. Salah satu program pengentasan dan pemberdayaan kemiskinan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, adalah Program Keluarga Harapan (PKH). (Rahmi Ulfa Aulia, 2022). Program Keluarga Harapan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di desa Toddotoa.

*“Ok jadi program keluarga harapan ini sangat membantu perekonomian masyarakat terlebih masyarakat tidak mampu, bisa memberikan bantuan ekonomi yang bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka sehingga daya ekonomi atau tingkat perekonomian masyarakat bisa tertolong” (W.7. sekretaris desa IB. Senin, 10 April 2023)*

Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat di desa Toddotoa, dan dengan adanya bantuan sosial ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga perekonomian masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan bisa tertolong dan bisa melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik lagi.

dan pengaruh PKH bisa di bilang membaik karena Keluarga penerima PKH mampu membiayai kebutuhan mereka sendiri. Dapat dilihat PKH ini cukup berdampak pada KPM karena Kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang baik di desa Toddotoa.

Namun disamping itu pernyataan lain dikemukakan oleh pendamping program keluarga harapan (PKH) mengenai dampak program keluarga harapan (PKH).

*“Ini juga yang menjadi kendala besar ta, karena masyarakat itu juga belum na pergunakan sebagaimana itu bantuannya karena bayangkan dari tahun 2010 sampai sekarang itu terima bantuan terus tidak ada yang mandiri artinya kan dikasi bantuan ini supaya bisa keluar dari garis kemiskinan tapi yang saya perhatikan bukan keluar dari garis kemiskinan malah ketergantungan sama bantuan ini”. (W. 1. Pendamping PKH BR. Rabu, 12 April 2023)*

masyarakat belum mepergunakan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) ini sebagaimana mestinya, karena sudah bertahun-tahun mulai dari tahun 2010 mereka mendapatkan bantuan sosial tersebut tetapi sampai sekarang belum mandiri. Program keluarga harapan (PKH) ini diharapkan mampu memandirikan masyarakat kurang mampu namun bukannya keluar dari garis kemiskinan tetapi mereka malah ketergantungan dengan bantuan program keluarga harapan (PKH) yang diberikan.

### **3. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH)**

#### **a. Jumlah bantuan program keluarga harapan yang diterima masyarakat**

Setiap penerima program keluarga harapan (PKH) diberikan kartu peserta sebagai bukti kepesertaan. Nama yang tercantum dalam kartu peserta program keluarga harapan rumah tangga sangat miskin (PKH RSTM) adalah nama perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi dan anak perempuan dewasa). (Elia, 2021)

Jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) bermacam-macam tergantung kategori, ada beberapa kategori penerima bantuan program keluarga

harapan (PKH) yaitu kategori kesehatan meliputi ibu hamil dan balita, kategori pendidikan mulai dari SD, SMP sampai SMA, dan kategori kesejahteraan sosial yaitu lansia mulai umur 60 tahun dan disabilitas. Bantuan ini dicairkan tiga bulan sekali atau empat kali dalam 1 tahun dan dicairkan melalui kantor POS atau bank BNI.

*“Kadang-kadang 1.400.000 kadang-kadang 900.000”.* (W.5. Masyarakat penerima bantuan PKH RN. Senin, 15 Mei 2023)

Jadi informan RN sebagai penerima bantuan program keluarga harapan mengatakan bahwa bantuan yang diterima itu sebesar 1.400.000 atau kadang-kadang 900.000 ini sesuai dengan kategori yang diterima, dan RN termasuk kategori pendidikan karena memiliki anak yang masih bersekolah ditingkat SD dan SMP.

Selanjutnya H mengatakan

*“Kalau saya 600.000 karena lansia toh. Kalau kategori kesehatan sama pendidikan itu beda lagi karena SD, SMP sama SMA itu berbeda juga di dapat”.* (W. 4. Masyarakat penerima bantuan PKH HN. Rabu, 03 Mei 2023)

Informan H mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) sebesar 600.000 karena kategorinya adalah lansia. Dan setiap masyarakat penerima bantuan ini mendapatkan jumlah bantuan yang berbeda-beda tergantung kategori yang di dapatkan seperti kategori kesehatan dan kategori pendidikan itu juga berbeda dan kategori pendidikan juga tergantung tingkatannya mulai dari SD, SMP dan SMA juga berbeda jumlah yang diterima masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

Selain dari jumlah bantuan yang didapatkan ketepatan dalam pendistribusian bantuan juga menjadi bagian yang cukup penting dalam bantuan program keluarga harapan (PKH).

*“Tepat, setiap tiga bulan sekali. empat kali dalam 1 tahun setiap tanggal baru. Dan kalau ada penerimaan selalu jadi juga na kabari pendamping PKH atau ketua kelompok bilang tanggal segini cair mi bantuan”.* (W.3. Masyarakat penerima bantuan PKH SN. Senin, 1 Mei 2023)

Pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) sudah tepat waktu dan informan SN mengatakan saat diwawancarai bantuan ini diterima setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam 1 tahun dan distribusi ini dilakukan setiap tanggal baru. Pada saat akan dilakukan distribusi pendamping PKH dan ketua kelompok akan menginformasikan kepada masyarakat penerima bantuan.

Informan AL juga mengatakan hal yang sama mengenai ketepatan waktu dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH).

*“Pernah beberapa kali tidak tepat waktu. Cuma lebih banyak tepat waktunya ji tawwa jadi bisa dikatakan tepat waktu ji dan selalu jadi menerima di awal bulan atau tanggal baru”.* (W.2. Masyarakat penerima bantuan PKH AL. Senin, 1 Mei 2023)

Pendistribusian bantuan program keluarga harapan (PKH) beberapa kali mengalami keterlambatan namun ketepatan waktunya lebih banyak jadi bisa dikatakan bahwa pendistribusian bantuan ini tepat waktu dan masyarakat selalu menerima bantuan tersebut setiao awal bulan atau pada tanggal baru.

b. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH)

Dengan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) yang bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, perempuan sebagai potensi dalam keluarganya mendapatkan pengetahuan tentang pola asuh, wawasan pendidikan yang baik untuk anak, dan pengelolaan keuangan keluarga dapat lebih baik, oleh pendamping PKH melalui pertemuan kelompok yang dilakukan sebelum pendistribusian bantuan dilakukan. (Khoiriyah, 2019)

Program keluarga harapan (PKH) mempunyai tujuan yaitu membuka akses bagi keluarga miskin terhadap berbagai fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, dan akses dalam usaha meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok rentan. Program keluarga harapan (PKH) ini mempunyai harapan supaya kedepannya keluarga miskin mampu keluar dari kemiskinan melalui peningkatan generasi mendatang dalam hal kesehatan dan pendidikan, sekaligus menjamin akses pelayanan bagi kelompok non produktif yaitu lansia dan disabilitas. (Sofianto, 2020)

*“Cukup puas karena dengan adanya program keluarga harapan ini cukup membantu perekonomian saya”.* (W.5. Masyarakat penerima bantuan PKH RN. Senin, 15 Mei 2023)

Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) ini cukup membantu perekonomian para penerima bantuan dan mereka cukup puas dengan bantuan yang diberikan karena dengan adanya bantuan ini mereka bisa lebih mandiri kedepannya.

*“Alhamdulillah puas ja karena sangat na bantu ka dalam hal ekonomi, setidaknya kodong niak tong ni tayang setiap tiga bulan”. (W.6. Masyarakat penerima bantuan PKH NL. Sabtu, 20 Mei 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan NL sebagai salah satu penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) mengatakan bahwa NL puasa dengan bantuan yang diterima karena dapat membantu dalam hal perekonomian dan NL juga mengatakan bahwa dengan mendapatkan bantuan tersebut NL merasa ada yang bisa dirahpakan setiap pertiga bulannya.

Selain dari tingkat kepuasan masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Masyarakat juga memberikan respon terhadap kinerja atau pelayanan pendamping PKH terhadap masyarakat penerima bantuan sosial.

*“Alhamdulillah bagusji dan amanah ji tawwa sejauh yang ku liat dan ku rasakan. Ka ini juga pemdamping PKH baru pi, punna tena ku salah awal tahun na jadi pendamping PKH, di bulan januari tapi bagusji tawwa ini pendamping PKH yang baru”. (W.6. Masyarakat penerima bantuan PKH NL. Sabtu, 20 Mei 2023)*

Informan NL meberikan respon terhadap kinerja pendamping PKH bahwa dalam menjalankan tugasnya pendamping PKH sudah bagus dan amanah, NL juga mengatakan bahwa pendamping PKH yang sekarang baru beberapa bulan menjadi pendamping PKH di desa Toddotoa namun walaupun baru menjadi pendamping kinerja atau pelayanan yang diberikan sudah bagus.

*“Pendamping yang sekarang ini masih baru, sekitar bulan januari 2023 na jadi pendamping di sini tapi selama menjadi pendamping PKH di desa Toddotoa tawwa bagusji dan baik ki juga tawwa*

*orangnya*". (W.3. Masyarakat penerima bantuan PKH SN. Senin, 1 Mei 2023)

Menurut pendapat SN sebagai salah satu masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yang menjadi pendamping PKH di desa Toddotoa ini masih baru, pendamping PKH yang sekarang ibu baru masuk sekitar bulan januari 2023, namun walaupun masih baru tetapi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan sudah bagus dan orangnya juga baik.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah terhadap masyarakat di Desa Toddotoa**

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar di fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH dibidang kesehatan adalah pemeriksaan bagi ibu hamil, pemberian gizi dan imunisasi dan penimbangan balita. Sedangkan kewajiban pada bidang pendidikan yaitu mendaftarkan dan memastikan keberadaan anggota keluarga, Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan harus sama dengan jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus bagi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya ringan atau berat (Kemensos RI, 2015). (Djabar, 2022)

Program keluarga harapan (PKH) adalah program lintas kementerian serta lembaga, karena actor utamanya yaitu badan perencanaan pembangun

nasional, kementerian sosial, Kementerian Kesehatan, kementerian pendidikan nasional, kementerian agama, kementerian komunikasi dan informatika, serta badan pusat statistik. Pakar program keluarga harapan (PKH) serta konsultan bank dunia. Program Keluarga Harapan (PKH) atau yang sering disebut (PKH) merupakan program bantuan sosial bagi rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberikan syarat supaya dapat mengubah perilaku masyarakat miskin. (Djabar, 2022)

Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat. Untuk menjadi peserta aktif, calon penerima PKH saat divalidasi dan verifikasi oleh petugas lapangan atau pendamping PKH selain namanya terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarga tersebut juga harus terpenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai ketentuan program.

Persyaratan tersebut dalam PKH disebut dengan Komponen. Penerima PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut : 1) Komponen Kesehatan. Kriteria penerima PKH komponen kesehatan sebagai berikut: a. Ibu Hamil/Nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui. b. Anak Usia Dini/Balita adalah anak dengan rentan usia 0-6 tahun (belum bersekolah). 2) Komponen Pendidikan. Kriteria penerima PKH



komponen pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/MTS sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat. 3) Komponen Kesejahteraan Sosial. Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : a. Lanjut Usia yaitu seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. b. Penyandang Disabilitas Berat yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Dalam distribusi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) memiliki mekanisme yang harus dilakukan mulai dari sosialisasi, pendataan sampai pada penyaluran bantuan kepada masyarakat yang namanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Teori sistem sosial Talcot Parsons mengatakan bahwa Teori sistem sosial menjelaskan tentang dinamika organisasi dalam istilah-istilah dari jaringan sosial, hubungan dan interaksi orang didalam dan diuar organisasi. Blau dan Scott (1962) mengenalkan dua prinsip dasar yang membantu mendefinisikan sistem sosial. Salah satunya adalah susunan hubungan-hubungan sosial, atau pola-pola dari interaksi-interaksi sosial didalam sistem sosial. Yang lain adalah budaya, atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang

di dalam sistem sosial. Dalam mekanisme pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) terdapat hubungan serta pola-pola interaksi antara pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan. Pendamping melakukan sosialisasi dan pendataan kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan, dan masyarakat pun ikut berpartisipasi dan bekerja sama dengan pendamping PKH dalam pendistribusian bantuan program keluarga harapan (PKH) dengan mengikuti rapat yang dilakukan sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan tersebut.

Teori fungsionalisme struktural Parsons ini terkenal dengan skema AGIL. Fungsi AGIL adalah “suatu gagasan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem” (Rocher, 1975:40). Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan (atau menjadi ciri) seluruh sistem yaitu: 1) *Adaptation*: sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya, dalam mekanisme penerapan program keluarga harapan terlebih dahulu harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima bantuan dengan terlebih melakukan pendataan dan sosialisasi terhadap masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan. 2) *Goal attainment*: sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya, didalam program keluarga harapan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan. 3) *Integration*: sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Iapun harus mengatur hubungan

antar ketiga imperative fungsional tersebut. Pendamping PKH dan pemerintah setempat harus saling bekerja sama sehingga dapat meningkatkan layanan Pendidikan, Kesehatan dan juga kesejahteraan sosial agar tujuan dari program keluarga harapan dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 4) *Latency*: sistem harus memelihara, dan memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut. Begitupun pada bantuan sosial program keluarga sosial, pendamping PKH memberikan arahan terkait program keluarga harapan serta motivasi kepada masyarakat penerima bantuan agar mempergunakan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya dan membimbing masyarakat agar bisa mandiri.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial untuk rumah tangga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial agar mampu meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya masalah kemiskinan yang terjadi di desa Toddotoa. (Sari, 2021)

Desa Toddotoa merupakan desa yang menerapkan program keluarga harapan (PKH) dan setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH). Mekanisme pendistribusian bantuan program keluarga harapan juga harus terhubung dengan dukcapil karena masyarakat tidak akan menerima bantuan apabila ada perbedaan nama. Serta ikutnya masyarakat berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial ini maka masyarakat yang datanya terdaftar pada data terpadu

kesejahteraan sosial (DTKS) maka dapat menerima bantuan program keluarga harapan.

Dalam pendistribusian bantuan sosial mempunyai Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH meliputi: 1) Pembukaan Rekening Kolektif (Burekol) untuk KPM PKH; 2) Sosialisasi dan edukasi penyaluran bantuan sosial; 3) Distribusi KKS dan Butab oleh Himbara dan BSI berkoordinasi dengan Dinsos Kab/Kota; 4) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); 5) Penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan dari RPL ke rekening KPM; 6) Pencairan dan pemanfaatan Dana Bantuan Sosial PKH; 7) Rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial PKH setiap tahap; 8) Pemantauan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH Non Tunai.

Untuk masyarakat Toddotoa yang ingin mengambil bantuan yang mereka dapatkan bisa melalui kantor POS atau bank BNI. Di samping itu terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) yaitu terkendala jarak karena tidak adanya ATM BNI di desa Toddotoa jadi masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) harus keluar untuk ke bank atau ATM untuk melakukan penarikan bantuan yang mereka terima.

## **2. mekanisme pendistribusian bantuan sosial pemerintah dapat memenuhi prinsip keadilan sosial masyarakat di Desa Toddotoa**

Menurut Amartya Sen, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pengentasan kemiskinan dan keadilan bagi masyarakat miskin harus

diwujudkan. Program keluarga harapan (PKH) merupakan bantuan untuk fakir miskin. Oleh karena itu, tujuan mengurangi ketimpangan ekonomi sejalan dengan tujuan program keluarga harapan (PKH) untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi melalui pemanfaatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. (Priambodo, 2019)

Program keluarga harapan (PKH) adalah praktik yang memberikan keadilan bagi masyarakat. Akses terhadap keadilan melampaui institusi dan dapat mencapai keadilan sosial dalam pelaksanaan PKH. Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) tidak hanya memberikan bantuan keuangan, tetapi juga membimbing masyarakat dalam mewujudkan tujuan program keluarga harapan (PKH).

Menurut teori keadilan Aristoteles. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Hal ini bisa dikatakan adil bila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional.

Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (undivided goods) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain. dalam pemberian bantuan sosial haruslah merata dan setiap orang harus mendapatkan apa yang menjadi

haknya. Dalam hal ini berupa bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan sosial yang namanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya prinsip keadilan sosial dalam distribusi bantuan program keluarga harapan (PKH) itu tergantung dari cara pandang masing-masing karena para penerima bantuan itu dipilih berdasarkan syarat dan kriteria program keluarga harapan (PKH). Adapun syarat penerima bantuan sosial program keluarga harapan yaitu warga negara Indonesia (WNI), memiliki kartu tanda penduduk (KTP), bukan merupakan pegawai pemerintah/aparatur negara, termasuk kedalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin, terdata di DTKS dan telah mengusulkan PKH di salah satu kategori. Jadi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan di Desa Toddotoa sudah memenuhi prosedur prinsip keadilan sosial karena para penerima bantuan sudah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan program keluarga harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pendamping kluster strategi pengentasan kemiskinan pertama di Indonesia. Program ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama program keluarga harapan (PKH) yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas wawasan dan perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), serta mempermudah akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan

yang diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan. (Muhammad Rizaldy Nugraha\*, 2020)

Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) di Desa Toddotoa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Desa Toddotoa karena dengan adanya bantuan untuk rumah tangga sangat miskin (RTSM) yaitu yang pertama meringankan beban pengeluaran RTSM dan dapat membantu keluarga yang menjadi peserta PKH untuk membiayai anak sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. sangat membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan. Selain dari dampak positif diatas terdapat juga dampak negatif karena adanya bantuan program keluarga harapan (PKH), yaitu masyarakat belum mepergunakan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya dan masyarakat belum bisa mandiri sehingga membuat mereka ketergantungan dengan bantuan sosial program keluarga harapan yang telah diberikan.

### **3. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH)**

Anggota keluarga penerima layanan yang selanjutnya disebut sebagai anggota penerima manfaat. Keluarga penerima Bantuan Sosial program keluarga harapan (PKH) berhak mendapatkan manfaat Ditentukan dalam persyaratan dan keputusan. Bantuan Sosial program keluarga harapan (PKH) merupakan Bantuan dalam bentuk uang kepada keluarga dan fakir miskin, tidak mampu serta rentan terhadap risiko sosial. Berdasarkan

persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). (Oktavia1, 2019)

Teori keadilan Aristoteles menjelaskan tentang Keadilan distributif, keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Hal ini bisa dikatakan adil bila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Begitupun dalam pendistribusian bantuan sosial terdapat keadilan distributif karena setiap peserta penerima bantuan akan diberikan kartu peserta sebagai bukti bahwa mereka memang betul-betul terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), serta jumlah yang diterima oleh masyarakat juga berbeda-beda tergantung kategorinya, ada beberapa kategori dalam program keluarga harapan dan dengan nominal yang berbeda-beda, yang pertama yaitu kategori Kesehatan meliputi bayi dan Ibu Hamil dengan jumlah yang diterima sebesar Rp 750.000, kategori pendidikan meliputi Siswa SD Rp 225.000, SMP Rp 375.000, dan SMA, Rp 500.000. dan kategori kesejahteraan sosial meliputi lansia dan disabilitas berat sebesar Rp. 600.000. Nantinya para penerima manfaat akan menerima bantuan ini yang dapat disalurkan melalui Bank Himbara yang telah disediakan oleh Pemerintah. Kemudian



masyarakat dapat mencairkan dananya melalui kantor pos atau Bank BNI terdekat.

Selain jumlah bantuan yang diterima ketepatan dalam pendistribusian bantuan juga sangat penting, di Desa Toddotoa dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) sudah tepat waktu, bantuan akan cair saat tanggal baru atau awal bulan. Bantuan PKH pada tahun ini akan diberikan dalam empat tahap, yaitu tahap pertama pada Januari hingga Maret 2023, tahap kedua pada April hingga Juni 2023, tahap ketiga pada Juli hingga September 2023, dan tahap keempat pada Oktober hingga Desember 2023. Dan bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) diterima oleh masyarakat satu kali dalam tiga bulan atau empat kali dalam setahun. Pada Program Keluarga Harapan terdapat banyak bimbingan untuk peserta Program Keluarga Harapan yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dan setiap akan dilakukan penyaluran maka pendamping PKH atau ketua kelompok akan menginformasikan kepada peserta penerima manfaat.

Dalam teori fungsionalisme struktural Talcot Parson yang dterkenal dengan teori AGIL dan menjelaskan mengenai goal attainment (pencapaian tujuan) yakni sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya. Begitupun dalam program keluarga harapan terdapat tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, calon anggota keluarga diberdayakan

dengan pengetahuan tentang pengasuhan anak, Anda bisa mendapatkan wawasan pendidikan yang luas dan keuangan rumah tangga yang lebih baik. Ini akan dikelola oleh Pendamping PKH melalui pertemuan kelompok yang diadakan sebelum bantuan disalurkan. (Khoiriyah, 2019)

Program ini memiliki harapan agar para penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Dan dengan adanya program bantuan sosial ini cukup membantu perekonomian masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

Pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) memiliki rekan-rekan yang berperan penting dalam menyukseskan program keluarga harapan (PKH). Pendamping PKH adalah orang yang ditunjuk, direkrut dan dikontrak oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana penyuluhan tingkat kecamatan. Keberhasilan program keluarga harapan (PKH) tergantung pada pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin (RTSM) dan peran pendamping PKH. Menurut Kementerian Sosial (2009), bantuan sosial mengacu pada pemanfaatan berbagai sumber daya dan kemungkinan untuk memecahkan masalah, meningkatkan dukungan, dan memenuhi kebutuhan hidup, serta menyediakan layanan sosial dasar kepada pelanggan. antara asisten dan klien yang bertujuan untuk meningkatkan akses. ketenagakerjaan, fasilitas dan pelayanan publik lainnya. (Rahmawati, 2017)

Peran pendamping PKH didasarkan pada pengertian bahwa ia merupakan penghubung antara masyarakat dengan berbagai lembaga yang terlibat, dan setiap tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang

diperlukan untuk pembangunan. Fasilitator sering dikaitkan dengan pekerja sosial, dan kegiatan pendampingan juga merupakan pekerjaan sosial.

Teori sistem sosial Talcot Parsons menjelaskan tentang dinamika organisasi dari istilah-istilah dari jaringan sosial, hubungan dan interaksi orang didalam dan diluar organisasi. Yang lain adalah budaya atau nilai-nilai kebersamaan dari orang-orang didalam sistem. Didalam mekanisme penyaluran bantuan sosial terdapat hubungan antara pendamping PKH dan masyarakat penerima bantuan sosial karena dalam program keluarga harapan, pendamping PKH berperan penting dalam menyukseskan tujuan program keluarga harapan. Sesuai dengan Peran pendamping yaitu memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui. Pendamping bertugas untuk mengontrol setiap bulannya kehadiran ibu hamil dan balita ke puskesmas (fasilitas kesehatan) dan juga mengontrol kehadiran anak sekolah di fasilitas pendidikan (anak SD, SMP, SMA) serta pertemuan kelompok yang dilaksanakan setiap bulannya. Sehingga dengan adanya peran pendamping PKH, bantuan sosial PKH bisa diberikan kepada sasaran yang tepat, sehingga masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan memberikan respon yang positif dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat penerima bantuan karena kinerja yang baik dan amanah dari pendamping PKH.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme distribusi bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di Desa Toddotoa memiliki mekanisme yang harus dilakukan mulai dari sosialisasi, pendataan, sampai pada penyaluran bantuan kepada masyarakat yang namanya terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Dan untuk penarikan bantuan sosial bisa dilakukan melalui POS dan bank BNI. Masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan selalu mengikuti rapat yang dilakukan sebelum bantuan dicairkan. Namun juga terdapat kendala dalam distribusi bantuan yaitu terkendala jarak karena tidak adanya ATM BNI di desa Toddotoa jadi masyarakat yang ingin melakukan pencairan bantuan harus keluar ke POS atau bank BNI.
2. pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan di Desa Toddotoa sudah memenuhi prinsip keadilan sosial. Dan dalam distribusi bantuan memberikan dampak yang baik karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun selain itu juga memberikan dampak negatif karena masyarakat belum mempergunakan bantuan yang diberikan sebagaimana mestinya dan masyarakat belum bisa mandiri sehingga membuat mereka ketergantungan dengan bantuan yang diberikan.

3. Respon dan tingkat kepuasan yaitu jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat juga berbeda-beda tergantung kategorinya, dan di Desa Toddotoa dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) sudah tepat waktu. Dan pendamping PKH di Desa Toddotoa kinerja serta pelayanan pendamping PKH bisa dibilang sudah bagus dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping PKH

## **B. Saran**

Setelah melihat hasil penelitian ini, beberapa hal menjadi sangat penting untuk peneliti sarankan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Kepada pendamping PKH agar selanjutnya dapat lebih memaksimalkan kinerja baik itu dalam hal mendata, sosialisasi, dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).
2. Untuk masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan agar lebih bisa berpartisipasi lagi dan agar menggunakan bantuan yang diterima sebagaimana mestinya.
3. Bagi perangkat desa agar nantinya bisa memberikan data terbaru calon penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk didata kembali oleh pendamping PKH.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama agar memperluas cakupan penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V., Sari, L., & Umar, R. (2022). *Implementasi Nilai Keadilan Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri*. 2 (6), 587-600. <https://doi.org/10.17977/um063v2i62022p587-600>
- Andre Kusumawardani. (2021). No Title. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14790-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/14790-Full_Text.pdf)
- Djabar, D. A. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango*. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 581-588.
- Elia, F. A. (2021). *Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika*. Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 15-42
- Febriansyah, F. I. (2017). *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologi Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 1-27.
- Georgi Ritzer, Douglas J. Googman. (2016). *Teori Sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*. Edisi terbaru. Bantul: Kreasi Wacana
- Hidayatulloh, A. N. (2019). *Peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat dalam kajian program keluarga harapan: tinjauan empirik dampak kesejahteraan dan kualitas hidup penerima manfaat*. 43(2), 97-116. <https://doi.org/https://doi.org/10.31105/mipks.v43i2.2142>
- Jumiani I, J. (2021). *Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Masyarakat Desa Pompengan Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- John W. Creswel. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Kartikasari, M. (2019). *Mewujudkan Keadilan : Kalangan Penyandang Disabilitas di The 2 —. he Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive*

*Education*, 201-216.

- Khoiriyah, N. (2019). *Graduasi Mandiri: Bentuk Keberdayaan Penerima Manfaat (Kpm) Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Pati*. *Komunitas*, 143-156.
- Nasution, B. J. (2014). *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. *Yustisia*, 118-130.
- NURISMA. (2021). *Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Simpang Kota Medan, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu*. 1-82.
- Manan, K. A. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Jember).
- Muhammad Ali Rofin<sup>1</sup>, A. B. (2023). *Analisis Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Oleh Lembaga Bantuan Hukum Peka Tuban*. *JOSh : Journal of Sharia*, 12-22.
- Muhammad Rizaldy Nugraha\*, D. N. (2020). *Dampak Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan*. *JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 30-44
- M, R. (2010). *triangulasi dalam penelitian kualitatif*. 1-3.
- Oktavia<sup>1</sup>, A. S. (2019). *Survei Tingkat Kepuasan Peserta Program*. *eJournal Sosiatri-Sosiolog*, 1-13.
- Priambodo, B. (2019). *Program Keluarga Harapan dari Perspektif Keadilan Amartya Sen "Keluarga Harapan" Program from Justice Perspective of Amartya Sen*. *Jurnal Politik Indonesia*, 1-14.
- Putri, F. E. (2019). *Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Seberang Taluk Hilir Kecamatan Kuantan Tengah Menurut Ekonomi Islam*. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/22539>
- Rahmawati, E. (2017). *Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan*. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 161-169.

- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). *Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.
- Rahmi Ulfa Aulia. (2022). *Dampak Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Piai Tengah*. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 5(3), 248–253. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pgde.v2i2.124>
- Rakhmat, F. (2019). *Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Adminitrasi Dan Studi Kebijakan*, 1(2), 33–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.48093/jiask.v1i2.11>
- Rismana, D. (2019). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, XI(2), 137–150.
- Sari, N. I. (2020). *Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Pemerataan Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10328>
- Sari, P. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai*. *Japb*, 426-440.
- Sofianto, A. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah*. *Sosio Konsepsia*, 14-31.
- Sulkarnain, S. (2021). *Program Keluarga Harapan dalam Mendukung Taraf Hidup Masyarakat: Kajian Implementasi di Parepare*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 42-47.
- SURONO, A. (n.d.). *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*. 1-17.
- Thalib, T. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo*. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 7(1), 39-48.
- Tusiono, Y. (2017). *Partisipasi Publik dalam Program Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus*. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online*



Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 3 (2), 64 76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36448/ejpp.v3i2.877>

Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). *Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid -19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar*. *Competence : Journal of Management Studies*, 16(1), 51–63. <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v16i1.14429>





## Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tabel 1.7: data penerima bantuan program keluarga harapan

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN
1	DN	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
2	NH	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
3	SDK	Bontotene	Toddotoa	Pallangga
4	SN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
5	DA	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
6	TRG	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
7	KHDN	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
8	SMDT	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
9	DN	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
10	DS	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
11	MDT	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
12	NDR	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
13	SB	Dusun Maroden	Toddotoa	Pallangga
14	YDR	Bontotene	Toddotoa	Pallangga
15	DT	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
16	SL	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
17	DR	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
18	DK	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
19	RI	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
20	DN	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
21	DPA	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
22	DNN	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
23	DP	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
24	NY	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
25	DMW	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
26	IM	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
27	JL	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
28	NDT	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
29	SDC	Bontote'ne	Toddotoa	Pallangga
30	SRT	Marodeng	Toddotoa	Pallangga

31	ADT	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
32	EDN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
33	WY	Dusun Marodeng	Toddotoa	Pallangga
34	MTA	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
35	SA	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
36	NDS	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
37	IDT	Bonto Tene	Toddotoa	Pallangga
38	HA	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
39	SG	Bontote'ne	Toddotoa	Pallangga
40	SA	Dusun Marodeng	Toddotoa	Pallangga
41	MR	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
42	ADS	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
43	RDK	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
44	TQ	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
45	EN	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
46	ST	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
47	NYT	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
48	KW	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
49	MTN	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
50	NIS	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
51	RDT	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
52	IA	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
53	NL	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
54	HDN	Bontote'ne	Toddotoa	Pallangga
55	DD	Bontote'ne	Toddotoa	Pallangga
56	NDR	Toddotoa	Toddotoa	Pallangga
57	SM	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
58	NN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
59	MDB	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
60	SGR	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
61	DJBM	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
62	ADS	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
63	SI	Toddotoa	Toddotoa	Pallangga
64	AL	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
65	SDN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga

66	NAI	Tallang -Tallang	Toddotoa	Pallangga
67	MRD	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
68	DT	Bontotene	Toddotoa	Pallangga
69	BDM	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
70	LA	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
71	DDN	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
72	SRI	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
73	DI	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
74	NLA	Bontotene	Toddotoa	Pallangga
75	SDR	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
76	DTR	Dusun Tallangtallang	Toddotoa	Pallangga
77	SDT	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
78	SM	Dusun Marodeng	Toddotoa	Pallangga
79	CDT	Dusun Marodeng	Toddotoa	Pallangga
80	NAW	Dusun Marodeng	Toddotoa	Pallangga
81	SRN	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
82	KDN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
83	ANI	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
84	BAU	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
85	STM	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
86	NHDK	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
87	DTA	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
88	RD	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
89	NDL	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
90	MDB	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
91	RDM	Bontote'ne	Toddotoa	Pallangga
92	MMG	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
93	HDL	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
94	IR	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
95	DRN	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
96	HRH	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
97	DPJ	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
98	RM	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
99	NDT	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
100	SA	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga

101	NG	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
102	MDP	Bontotene	Toddotoa	Pallangga
103	HDT	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
104	JR	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
105	HDK	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
106	MDN	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
107	NL	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
108	RMY	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
109	EI	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
110	SDN	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
111	SN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
112	MA	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
113	KB	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
114	KDP	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
115	DKB	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
116	HS	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
117	FR	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
118	NDN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
119	ADR	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
120	DNG	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
121	SM	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
122	MW	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
123	JDS	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
124	AS	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
125	HDL	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
126	CDG	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
127	NDK	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
128	DB	Toddotoa	Toddotoa	Pallangga
129	CDS	Bontote'ne	Toddotoa	Pallangga
130	DS	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
131	MDS	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
132	DBG	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
133	KDM	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
134	SLDN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
135	SDJ	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga

136	BY	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
137	DNG	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
138	SAN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
139	NDS	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
140	NYI	Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
141	SDT	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
142	SBR	Bonto Tene	Toddotoa	Pallangga
143	SRT	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
144	LDK	Bonto Te'ne	Toddotoa	Pallangga
145	HDH	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga
146	KMI	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
147	FA	Dusun Toddopuli	Toddotoa	Pallangga
148	SDG	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
149	RDK	Dusun Marodeng	Toddotoa	Pallangga
150	BDL	Tallang-Tallang	Toddotoa	Pallangga
151	NLA	Borongkaramasa	Toddotoa	Pallangga
152	RN	Borong Karamasa	Toddotoa	Pallangga
153	RT	Marodeng	Toddotoa	Pallangga
154	DNTG	Tallang Tallang	Toddotoa	Pallangga

*Sumber : Pendamping PKH Desa Toddotoa*

Tabel 1.8: Skema Jumlah Bantuan PKH Berdasarkan Komponen

No	Komponen	Jumlah Per Tahap	Jumlah Per Tahun
1.	Kesehatan		
	a. Ibu hamil/menyusui	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
	b. Usia dini/balita	Rp. 750.000	Rp. 3.000.000
2.	Pendidikan		
	a. SD	Rp. 225.000	Rp. 900.000
	b. SMP	Rp. 375.000	Rp. 1.500.000
	c. SMA	Rp. 500.000	Rp. 2.000.000
3.	Kesejahteraan sosial		
	a. Lanjut usia (lansia)	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000
	b. Disabilitas berat	Rp. 600.000	Rp. 2.400.000

Sumber: Pendamping PKH Desa Toddotoa





**Mekanisme Pelaksanaan PKH**

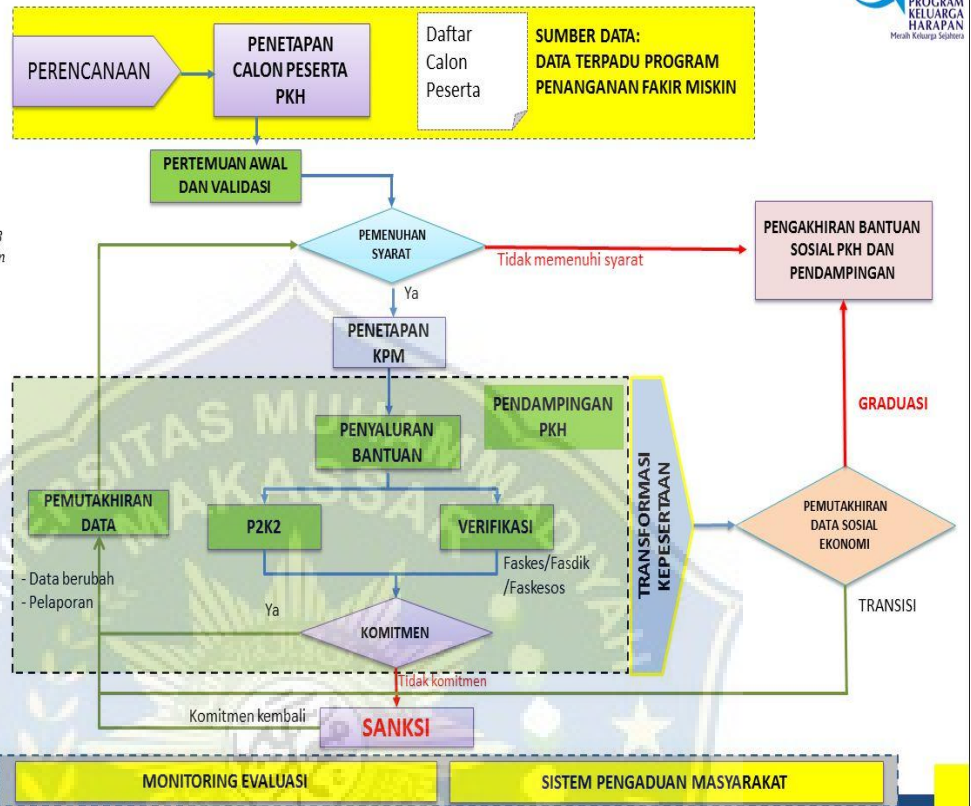
Pasal 32  
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 8 Januari 2018 tentang Program Keluarga Harapan

**KEGIATAN PENDUKUNG**

- Rapat Koordinasi Nasional
- Rapat Koordinasi Daerah
- Seleksi SDM
- Diklat
- Workshop
- Bimbingan Teknis
- Bimbingan Pemantapan
- E-Learning FDS



PKH 1500299



**PEDOMAN OBSERVASI**

Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga  
Harapan Pemerintah Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa

No	Pokok Masalah	Dimensi	Indikator	Sumber	Teknik Pengumpulan Data	Alat Pengumpulan Data
1.	Gambaran umum Desa Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa	Kondisi desa Toddotoa, Kec. Pallangga Kab. Gowa	a. Sejarah b. Letak geografis c. Kondisi penduduk d. Kondisi pendidikan e. Data penerima bantuan sosial PKH f. Pemerintahan	Kantor Desa Toddotoa	Studi kepustakaan, observasi	Buku catatan dan pedoman
2.	Gambaran umum bantuan sosial program keluarga harapan (PKH)		a. Pengertian PKH b. Sistem dalam distribusi bantuan PKH c. Kriteria penerima bantuan	pendamping PKH	Studi pustaka, dan wawancara	Pedoman, buku catatan, alat perekam, dan penangkapan gambar
3.	Implementasi	a. Bantuan	a. Mekanisme	Masyarakat,	Wawancara	Pedoman,

	<p>prinsip keadilan sosial pada distribusi bantuan sosial PKH</p>	<p>sosial PKH</p> <p>b. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat</p>	<p>pendistribusian bantuan sosial PKH</p> <p>b. Pendistribusian bantuan sosial dapat memenuhi prinsip keadilan sosial</p> <p>c. Respon dan tingkat kepuasan masyarakat</p>	<p>Pendamping PKH, dan kepala desa Toddotoa</p>	<p>buku catatan, alat perekam, dan penangkapan gambar</p>
--	---	--	--	---	---



## **PEDOMAN WAWANCARA**

Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Pemerintah Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa

### **Pertanyaan untuk masyarakat penerima bantuan sosial PKH**

1. Apakah anda mengetahui apa itu program keluarga harapan?
2. Sudah berapa lama anda menerima bantuan sosial Program keluarga harapan?
3. Apakah anda mengetahui jumlah yang sebenarnya di terima pada program keluarga harapan?
4. Berapakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima?
5. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya?
6. Bila tidak sesuai dengan jumlah bantuan sosial PKH yang anda terima maka berapa selisih dari jumlah yang sebenarnya?
7. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan?
8. Bagaimana pelayanan pendampingan bantuan sosial program keluarga yang anda rasakan ?
9. Apakah bantuan sosial program keluarga harapan yang anda terima tepat waktu?
10. Apakah anda puas dengan bantuan yang diterima?
11. Menurut anda apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah adil dan merata?

**Pertanyaan untuk pendamping PKH?**

1. Seperti apa sosialisasi terhadap masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan?
2. Siapa saja yang berhak menerima bantuan program keluarga harapan?
3. Apa saja yang menjadi kriteria penerima bantuan?
4. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan ini sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya? Apakah dalam penyaluran bantuan ini masyarakat mendapatkan bantuan secara penuh atau tidak?
5. Menurut anda bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan program keluarga harapan?
6. Menurut anda apakah dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan sudah efektif?
7. Apakah masyarakat penerima bantuan ikut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan?
8. Apakah distribusi bantuan program keluarga harapan sudah tepat sasaran? Dan sudah memenuhi prinsip keadilan sosial?
9. Apa saja kendala yang dialami dalam distribusi bantuan sosial program keluarga harapan?
10. Bagaimana dampak terhadap masyarakat setelah dilakukannya penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan?

**Pertanyaan untuk kepala desa**

1. Siapa sajakah yang terlibat dalam distribusi bantuan program keluarga harapan?
2. Apakah pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam distribusi bantuan program keluarga harapan ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
3. Apakah bapak terlibat dalam pendataan penduduk yang berhak menerima bantuan sosial program keluarga harapan?
4. Apakah bapak ikut turun kelapangan untuk memantau ketika distribusi bantuan dilakukan?
5. Bagaimana mekanisme distribusi bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat?
6. Apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah merata?
7. Apakah distribusi bantuan sosial pemerintah tersebut memenuhi prinsip keadilan sosial ?
8. Apakah dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini ada anggota masyarakat menerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan?
9. Apakah dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini ada masyarakat yang komplain? Bila masyarakat yang komplain bagaimana cara anda sebagai kepala desa menyelesaikan masalah tersebut? Bila bapak sudah memberikan solusi apakah anggota masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan dapat memahami?
10. Bagaimana dampak setelah penyaluran bantuan program keluarga harapan terhadap desa yang bapak pimpin?

## PEDOMAN DOKUMENTASI

Implementasi Prinsip Keadilan Sosial Pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Pemerintah Terhadap Masyarakat Di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa

### 1. Data Kelembagaan

- a. Sejarah
- b. Letak geografis
- c. Kondisi penduduk
- d. Kondisi pendidikan
- e. Data penerima bantuan sosial PKH
- f. Pemerintahan



## Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Pendamping PKH

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : BR  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Pendamping PKH

1. Seperti apa sosialisasi terhadap masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan?
  - Pertama awal masuknya itu tahun 2016 ada namanya undangan pertemuan awal, disitu mi kita sosialisasikan syarat dan kriterianya. Kalau di PKH itu kan bantuan bersyarat dimana persyaratannya itu ada 3 komponen yang pertama itu komponen kesehatan. Komponen kesehatan itu ada yang namanya kategori ibu hamil dan balita, yang kedua komponen pendidikan ini ada anak SD, SMP dan SMA dan ketiga komponen kesejahteraan sosial itu disabilitas berat dan lansia 60 keatas dan harus terdaftar di DTKS kalau tidak terdaftar di DKTS biar miskin bagaimanapun tidak akan menerima bantuan.
2. Siapa saja yang berhak menerima bantuan program keluarga harapan?
  - Itumi yang saya bilang, masyarakat yang terdaftar datanya di DKTS dan eh inimi mungkin yang terdaftar di DKTS yang memiliki 3 tadi eh komponen.
3. Apa saja yang menjadi kriteria penerima bantuan?



- Eh itu tadi terdaftar di DKTS karena yang sekarang itu yang terdaftar di DKTS ka biar orang miskin kalau tidak terdaftar di DKTS tidak akan anui, kalau kita mangatakan bahwa dia miskin baru tidak terdaftar di DKTS tidak akan terimai bantuan.
4. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan ini sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya? Apakah dalam penyaluran bantuan ini masyarakat mendapatkan bantuan secara penuh atau tidak?
- Kan macam-macam bantuannya kalau SD itukan bedai SD itu 225 per 3 bulan kan beda-beda itu yang sama itu disabilitas berat dan lansia itu 600 per 3 bulannya, kalau ibu hamil dan balita itu 350 per 3 bulan. Eh SMP itu 375, SMA tadi 500 kaaau SMA 500, SD 225, SMP 375, SMA 500.
  - Eh kalau ini kan mereka masing-masing pegang kartu, jadi ndak tau mi ia kalau ada lagi pihak-pihak lain, tapi kalau saya ku sarankan kita yang langsung ke ATM ka atau brimo kan adaji agennya disana. Kalau saya penuh pasti itu tapi tidak taumi ia kalau ada lagi, tapi biasanya biaya adminnya.
5. Menurut anda bagaimana mekanisme pendistribusian bantuan program keluarga harapan?
- Eh ini juga yang perlu, kan kalau di bank itu dia tidak mau menyalurkan itu kalau ada nama berbeda, beda huruf kah. Ada itu beberapa yang pernah masuk kodong, itu yang menjadi kendala ku sekarang karena dari kementerian sosial juga belum ada jawaban pasti jadi yah itu yang jadi kendala besar kami dan bukan ji juga Cuma di Gowa, karena waktu pertamanya kementerian sosial itu tahun 2021ada 21 juta data lebih belum diperbaiki. Masih ada juga

beberapa empat ki dalam KK tapi yang terdaftar datanya di DTKS Cuma tiga ini juga yang jadi kendala karena data penerima bantuan ini harus konet dengan dukcapil jadi ada juga masyarakat yang biar berapa kalimi dikasi tau bilang ki aktifkan ki nik ta ini juga yang menjadi masalah karena mereka juga menunggu dan kita lagi na suruh dan capil juga tidak mau kalau bukan orangnya sendiri.

6. Menurut anda apakah dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan sudah efektif?

➤ Efktif untuk saat ini karena, Cuma yang jadi kendalanya karena di sampai di desa-desa kan tidak ada mesin ATM jadi otamatis harus ke BRI link, kan agen-agen BRI link yang banyak sekarang di daerah-daerah, pelosok-pelosok, tidak adapi mesin ATM itu yang jadi kendalanya, kalau melalui penyalurnya bagus mi karena tidak kayak dulu, tapi itu juga masyarakat yang saya jangan sampai kana da na bilang orang biasa itu na kasi pegangi simpan di rentenir na jaminkan kartunya itu sebenarnya juga tidak boleh nah kalau itu ketahuan bisa jadi bantuannya di putus.

7. Apakah masyarakat penerima bantuan ikut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan program keluarga harapan?

➤ Iya karena mereka sendiri yang pegang kartunya jadi mereka sendiri, jadi ini artinya masyarakat diajarki utntuk bagaimana supaya tauki menggunakan kartu ATM, karena mereka di fasilitasi kartu ATM, kecuali ada juga biasa masyarakat yang masa bodoh na bilang bawakkan ma. Nah ini biasa yang jadi anu karena na bilang dipotongi kalau ada masuk padahal dia tongji yang

kasi toh bilang ambilkanga. Tapi orang juga misalnya kalau pergi dari Toddotoa keluar ke ATM tidak mungkin juga orang jalan kaki.

8. Apakah distribusi bantuan program keluarga harapan sudah tepat sasaran? Dan sudah memenuhi prinsip keadilan sosial?

➤ Itu yang tadi saya bilang mau miskin tidak miskin kalau masuk datanya di DTKS itu tetap terima bantuan. Biasanya kan Cuma dia terima PBI semua bantuan sosial itu PBI termasuk sembako,PKH. Itu sampai desil empat itu masih menerima makanya ku bilang mau miskin tidak miskin kalau masuk datanya di DTKS itu pasti dapat bantuan.

9. Apa saja kendala yang dialami dalam distribusi bantuan sosial program keluarga harapan?

➤ Terkendala jarak karena kalau lewat POS, karena sekarang itu ada lagi yang lewat POS, dulu langsung masuk direkeningnya masing-masing kan ini bulan 3 kemarin itu ada yang pertama itu tahap satu mi dia terima di Bank BNI dan ada juga beberapa nama yang melalui POS.

10. Bagaimana dampak terhadap masyarakat setelah dilakukannya penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan?

➤ Ini juga yang menjadi kendala besar ta, karena masyarakat itu juga belum na pergunakan sebagaimana itu bantuannya karena bayangkan dari tahun 2010 sampai sekarang itu terima bantuan terus tidak ada yang mandiri anrtinya kan dikasi bantuan ini supaya bisa keluar dari garis kemiskinan tapi yang saya perhatikan bukan keluar dari garis kemiskinan malah ketergantungan sama bantuan ini.

## Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima Bantuan PKH

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : AL  
Umur : 37 Tahun  
Pekerjaan : IRT

1. Apakah anda mengetahui apa itu program keluarga harapan?
  - Program keluarga harapan PKH adalah untuk memberikan bantuan berupa bantuan bersyarat kepada masyarakat miskin dan atau rentang yang datanya terdaftar pada data berpandu program penanganan fakir miskin.
2. Sudah berapa lama anda menerima bantuan sosial Program keluarga harapan?
  - 2 tahun.
3. Apakah anda mengetahui jumlah yang sebenarnya di terima pada program keluarga harapan?
  - 950.000
4. Berapakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima?
  - 9 stengah.
5. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya?
  - Iya sudah sesuai.

6. Bila tidak sesuai dengan jumlah bantuan sosial PKH yang anda terima maka berapa selisih dari jumlah yang sebenarnya?
- Tidak ada selisih.
7. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan?
- Oh rapat iya ikuki.
8. Bagaimana pelayanan pendampingan bantuan sosial program keluarga yang anda rasakan ?
- Bajikki, baik ki
9. Apakah bantuan sosial program keluarga harapan yang anda terima tepat waktu?
- Pernah beberapa kali tidak tepat waktu. Cuma lebih banyak tepat waktunya ji tawwa jadi bisa dikatakan tepat waktu ji dan selalu jaki menerima di awal bulan atau tenggal baru.
10. Apakah anda puas dengan bantuan yang diterima?
- Iya sangat puas.
11. Menurut anda apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah adil dan merata?
- Iya adil mi. karena sesuai orang yang dapat bantuan itu sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan PKH.

### Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima Bantuan PKH

#### IMPLEMENTASI PRINSIP Keadilan Sosial pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan terhadap Masyarakat di Desa Toddotoa Kabupaten Gowa

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : SN  
Umur : 39 Tahun  
Pekerjaan : IRT

1. Apakah anda mengetahui apa itu program keluarga harapan?
  - Program keluarga harapan adalah merupakan perlindungan atau pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
2. Sudah berapa lama anda menerima bantuan sosial Program keluarga harapan?
  - Sudah ada 6 tahun.
3. Apakah anda mengetahui jumlah yang sebenarnya di terima pada program keluarga harapan?
  - Kalau balita 600, lansia 600 eh SMP 32 stengan SMA 600 SD 250.
4. Berapakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima?
  - Biasanya 1,5 juta.
5. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya?
  - Iya.

6. Bila tidak sesuai dengan jumlah bantuan sosial PKH yang anda terima maka berapa selisih dari jumlah yang sebenarnya?
  - Tidak adaji karena sesuai ji.
7. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan?
  - Ikut. Rapat.
8. Bagaimana pelayanan pendampingan bantuan sosial program keluarga yang anda rasakan ?
  - Pendamping yang sekarang ini masih baru, sekitar bulan januari 2023 na jadi pendamping di sini tapi selama menjadi pendamping PKH di desa Toddotoa tawwa bagusji dan baik ki juga tawwa orangnya.
9. Apakah bantuan sosial program keluarga harapan yang anda terima tepat waktu?
  - Tepat, setiap tiga bulan sekali. empat kali dalam 1 tahun setiap tanggal baru. Dan kalua ada penerimaan selalu jaki juga na kabari pendamping PKH atau ketua kelompok bilang tanggal segini cair mi bantuan.
10. Apakah anda puas dengan bantuan yang diterima?
  - Iya puas.
11. Menurut anda apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah adil dan merata?
  - Sudah.

#### Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima Bantuan PKH

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : HN  
Umur : 63 Tahun  
Pekerjaan : Tidak bekerja

1. Apakah anda mengetahui apa itu program keluarga harapan?
  - Program keluarga harapan itu program dari pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan para penerimanya harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan, benar-benar anjo kategori mampu toh kana ane layakki untuk menerima.
2. Sudah berapa lama anda menerima bantuan sosial Program keluarga harapan?
  - 5 tahun mi, mulai dari 2018 sampai sekarang 2023 toh, 5 tahun mi.
3. Apakah anda mengetahui jumlah yang sebenarnya di terima pada program keluarga harapan?
  - Kalau saya ia ku tauki 600.0000 karena langsia toh, karena beda-bedai setiap kategori.
4. Berapakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima?
  - Kalau saya 600.000 karena langsia toh. Kalua kategori kesehatan sama pendidikan itu beda lagi karena SD,SMP sama SMA itu beda-beda juga di dapat.



5. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya?
  - Sudah sesuai tawwa karena sesuai kategori ji, kalau banyak kategorinya, banyak juga na terima tapi kan saya satuji langsia ji toh jadi Cuma 600.000
6. Bila tidak sesuai dengan jumlah bantuan sosial PKH yang anda terima maka berapa selisih dari jumlah yang sebenarnya?
  - Paling biaya admin ji dipotong toh kalau misalnya eh ambil ki di BRI link atau di POS paling di potong biaya admin ji, ituji saja 5000 ji kalau potongan admin toh kecuali ojek ki kesana dipotongi lagi uang ojek tapi kalau disitu jaki yang dekat-dekat ka di BRI link tidakji biaya admin ji 5000 ji.
7. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan?
  - Ikut jaki selalu kalau ada rapat-rapat toh pasti ikut jaki kalau adaji kabar kalau rapatki hari rabu misalnya ikut semuaji anggotanya karena tidak mungkin kalau uangnya cepatki baru rapat-rapatnya tidak mau ki hadir jadi pasti hadir jaki semua, setiap ada penerimaan rapat ki dulu baru cair ki itu uanga.
8. Bagaimana pelayanan pendampingan bantuan sosial program keluarga yang anda rasakan ?
  - Ya Alhamdulillah bagus ji, karena sesuai ji tawwa sesuai ji kategori.
9. Apakah bantuan sosial program keluarga harapan yang anda terima tepat waktu?
  - Ya kadang tepat waktu kadang juga terlambat sesuai informasi dari anuji dari ketua bilang kapan ki menerima tapi kebanyakan tawwa tepat waktu ji.
10. Apakah anda puas dengan bantuan yang diterima?

- Alhamdulillah puas, gappa dapat ki 600 puas maki itu, setiap 3 bulan ini bantuan.

11. Menurut anda apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah adil dan merata?

- Yah sebenarnya sih belum adil karena banyak juga kodong yang belum terima yang seharusnya benar-benar eh harus itu menerima tapi tidak terdata mungkin datanya atau bagaimana tapi masih ada juga yang tidak menerima padahal harus ki dapat.



## Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima Bantuan PKH

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : RU  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : IRT

1. Apakah anda mengetahui apa itu program keluarga harapan?
  - Program dari pemerintah yang diberikan pada orang miskin
2. Sudah berapa lama anda menerima bantuan sosial Program keluarga harapan?
  - Sudah 7 tahun
3. Apakah anda mengetahui jumlah yang sebenarnya di terima pada program keluarga harapan?
  - Tidak tentu tergantung kategori penerima.
4. Berapakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima?
  - Kadang-kadang 1.400.000 kadang-kadang 900.000
5. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya?
  - Kadang-kadang 1.400.000 kadang-kadang 900.000, karena kalua masukmi SD anakku berkurangmi ku terima
6. Bila tidak sesuai dengan jumlah bantuan sosial PKH yang anda terima maka berapa selisih dari jumlah yang sebenarnya?

- Sudah sesuai
7. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan?
- Iya saya ikut berpartisipasi karena pada saat ada rapat tentang program keluarga harapan yang di infokan oleh pendamping saya selalu hadir
8. Bagaimana pelayanan pendampingan bantuan sosial program keluarga yang anda rasakan ?
- Baik dan bijaksana
9. Apakah bantuan sosial program keluarga harapan yang anda terima tepat waktu?
- Iya tepat waktu, karena sesuai dengan tanggalnya
10. Apakah anda puas dengan bantuan yang diterima?
- Cukup puas karena dengan adanya program keluarga harapan ini cukup membantu perekonomian saya
11. Menurut anda apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah adil dan merata?
- Sudah adil dan merata karena yang mendapatkan bantuan ini sesuai dengan kriteria penerima bantuan program keluarga harapan (PKH)

## Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Masyarakat Penerima Bantuan PKH

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : NL  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : IRT

1. Apakah anda mengetahui apa itu program keluarga harapan?
  - Program keluarga harapan itu program dari pemerintah untuk masyarakat kurang mampu atau miskin supaya kulle tongi nibajiki anjo perekonomianga.
2. Sudah berapa lama anda menerima bantuan sosial Program keluarga harapan?
  - Punna nakke ia sallo-sallo mi, adami 4 tahun ka dapat itu bantuan.
3. Apakah anda mengetahui jumlah yang sebenarnya di terima pada program keluarga harapan?
  - Iye itu tergantungji kategori ni gappaya, karena beda-beda setiap kategori kayak ibu hamil sama balita itu samaji, kalua pendidikan sama lansia siangang disabilitas itu bedai.
4. Berapakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima?
  - Kalua saya itu 375.000 karena kategori pendidikan dan anakku itu masih SMP jadi 375.000 yang ku terima setiap pertiga bula.
5. Apakah jumlah bantuan program keluarga harapan yang anda terima sudah sesuai dengan jumlah yang sebenarnya?

- Sudah sesuai karena setiap pertiga bulan itu 375.000 yang kuterima. Ituji biasanya dipotong untuk biaya admin ji 5.000 palingan toh kalua pergi ambil itu uang.
6. Bila tidak sesuai dengan jumlah bantuan sosial PKH yang anda terima maka berapa selisih dari jumlah yang sebenarnya?
- Anjo ji sumpaeng ku kana sesuai ji karena tetapi 375.000 ku terima.
7. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pendistribusian bantuan sosial program keluarga harapan?
- Iye selalu ja ikut karena kalua ada sosialisasi atau rapat ikut terusja karena selalu ji di infokan sama pendamping PKH atau ketua kelompok.
8. Bagaimana pelayanan pendampingan bantuan sosial program keluarga yang anda rasakan ?
- Alhamdulillah bagusji dan amanah ji tawwa sejauh yang ku liat dan ku rasakan. Ka ini juga pemdamping PKH baru pi, punna tena ku salah awal tahun na jadi pendamping PKH, di bulan januari tapi bagusji tawwa ini pendamping PKH yang baru.
9. Apakah bantuan sosial program keluarga harapan yang anda terima tepat waktu?
- Iye tepat waktu ji, ini bantuan program keluarga harapan setiap tanggal baru diterima.
10. Apakah anda puas dengan bantuan yang diterima?
- Alhamdulillah puas ja karena sangat na bantu ka dalam hal ekonomi, setidaknya kodong niak tong ni tayang setiap tiga bulan.

11. Menurut anda apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah adil dan merata?

- Iye sudah adilmi, karena ianjo anggappaya memang sudah seharusnya anggappa.



## Lampiran 7 : Pedoman Wawancara Sekretaris Desa Toddotoa

### IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN SOSIAL PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP MASYARAKAT DI DESA TODDOTOA KABUPATEN GOWA

Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi data-data di bawah ini sesuai dengan sebenar-benarnya. Pedoman ini bertujuan untuk membantu penulis dalam proses kelancaran menempuh tugas akhir.

Nama : IB, S.Pd  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Perangkat desa/Sekdes

1. Siapa sajakah yang terlibat dalam distribusi bantuan program keluarga harapan?
  - Pendamping PKH dengan Bank BNI karena sudah ada kartunya.
2. Apakah pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam distribusi bantuan program keluarga harapan ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik?
  - Iya sudah dijalankan dengan baik.
3. Apakah bapak terlibat dalam pendataan penduduk yang berhak menerima bantuan sosial program keluarga harapan?
  - Dari segi pendataan itu datanya sudah ada dari pusat jadi datanya sudah jadi diberikan ke desa jadi secara desa tidak terlibat dalam pendataan.
4. Apakah bapak ikut turun kelapangan untuk memantau ketika distribusi bantuan dilakukan?
  - Ketika ada laporan dari pendamping PKH bahwasanya terjadi distribusi kami turun, jadi tergantung informasinya.
5. Bagaimana mekanisme distribusi bantuan sosial program keluarga harapan terhadap masyarakat?



- Iya itu distribusinya melalui penarikan tunai di agen atau di BNI.
6. Apakah penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini sudah merata?
- Dia merata ke setiap KPM. Jadi artinya penerima yang mendapatkan itu sudah adanya namanya jadi namanya itu yang berdasarkan nama yang tertera.
7. Apakah distribusi bantuan sosial pemerintah tersebut memenuhi prinsip keadilan sosial ?
- Kalau ini tergantung pola pandang, karena data itu sudah barang jadi yang datang otomatis disesuaikan sudah ada penilaian khusus dari yang menurunkan itu jadi mungkin sudah memenuhi prinsip tersebut.
8. Apakah dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini ada anggota masyarakat menerima bantuan tetapi tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan?
- Kalau hal itu yang lebih paham itu adalah pendamping PKH karena kami ada kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pendamping PKH itu sendiri. Kalau kami di desa itu hanya berbentuk pelaporan saja, hasil laporan.
9. Apakah dalam penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan ini ada masyarakat yang komplain? Bila masyarakat yang komplain bagaimana cara anda sebagai kepala desa menyelesaikan masalah tersebut? Bila bapak sudah memberikan solusi apakah anggota masyarakat penerima bantuan sosial program keluarga harapan dapat memahami?
- Kalau dari penerima PKH sendiri yang tertera namanya di KPM itu jarang ada yang complain persoalan distribusi karena sudah diatur oleh pendamping PKH

sehingga lebih teratur dan proses penyaluran sampai pendistribusian itu bisa efisien kerjanya.

10. Bagaimana dampak setelah penyaluran bantuan program keluarga harapan terhadap desa yang bapak pimpin?

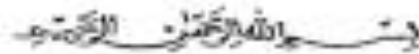
- Ok jadi program keluarga harapan ini sangat membantu perekonomian masyarakat terlebih masyarakat tidak mampu bisa memberikan bantuan ekonomi yang bisa melanjutkan kelangsungan hidup mereka sehingga daya ekonomi atau tingkat perekonomian masyarakat bisa tertolong.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972, 881593, Fax.(0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nur Annisa K  
NIM : 105091101321  
Program Studi : Magister Pendidikan Sosiologi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	6 %	15 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 07 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT, Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nur Annisa K, M.P.  
NIM. 964 591

SAB I NUR ANNISA K 105091101321

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[ojs.uniska-bjm.ac.id](http://ojs.uniska-bjm.ac.id)

Internet Source



5%

2

[www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)

Internet Source



5%

Exclude quotes

Exclude

Exclude bibliography



# BAB II NUR ANNISA K 105091101321

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[pengertiandanartikel.blogspot.com](http://pengertiandanartikel.blogspot.com)

Internet Source

4%

2

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

3

Wildan Rahmansyah, Resi Ariyasa Qadri, Ressa Anggia Sakti, Syaiful Ikhsan.

"PEMETAAN PERMASALAHAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2020

Publication

2%

4

[stia-binataruna.e-journal.id](http://stia-binataruna.e-journal.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



# BAB III NUR ANNISA K 105091101321

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Negeri Jakarta  
Student Paper

4%

2

Submitted to Universitas Negeri Jember  
State University of Surabaya  
Student Paper

2%



Exclude quotes

0%

Exclude bibliography

0%

# BAB IV NUR ANNISA K 105091101321

## ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On



4.2%





# BAB V NUR ANNISA K 105091101321

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes On

Exclude bibliography On



## RIWAYAT HIDUP



Nur Annisa K, lahir di Borong Karamasa pada tanggal 27 Oktober 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Karim dan Rusni. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2004 di SDN Kampung Parang dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2013. Dan di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Pallangga dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Sosiologi dan selesai pada tahun 2020 dengan gelar sarjana pendidikan S.Pd. Kemudian mendaftar pada jenjang S2 pada tahun 2021, kemudian berhasil mendapatkan gelar Magister Pendidikan Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2023.

Penulis sangat bersyukur karena berkat kesempatan yang di berikan oleh Allah S.W.T penulis bisa menimbah ilmu dan mendapatkan gelar magister, penulis berharap ilmu yang selama ini di dapatkannya dapat berguna bagi dirinya, keluarga serta orang lain.